

**ANALISIS PENGARUH PAD, DAU, DAN INVESTASI
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR PADA MASA
DESENTRALISASI FISKAL**

(studi kasus di 38 kabupaten/kota provinsi Jawa Timur)

SKRIPSI

Disusun oleh :

**NASRUL HASAN AMARULLOH NOER
0710213039**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Derajat Sarjana Ekonomi**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2012**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PENGARUH PAD, DAU, DAN INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR PADA MASA DISENTRALISASI FISKAL (STUDI KASUS DI 38 KOTA/KABUPATEN PROVINSI JAWA TIMUR)”** sesuai dengan waktu yang diharapkan.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan program strata satu pada jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi pembaca. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, banyak pihak yang telah berperan memberikan bimbingan, arahan, kritik, dorongan, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas karunia dan anugerah-Nya yang telah Dia berikan.
2. Bapak Dr. Susilo, SE, Ms selaku dosen pembimbing
3. Bapak Prof. Candra. F, SE.,M.Sc.,Ph.D selaku dosen penguji I
4. Bapak Dr. Rachmad Kresna Sakti, SE.,M.Si. selaku dosen penguji II
5. Bapak Gugus Arianto, SE., MSA., Ph.D. Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
6. Bapak Dr. Ghozali Maski, SE., MS. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.

7. Buat kedua Orang Tuaku Papa Nuryaqin dan Mama Ismayani yang sudah mendidik saya dan membesarkan saya serta memberikan bantuan moral dan semangat serta nasehat yang membuat penulis tergugah untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Buat kakak saya tersayang dr.Sevria Yetty yang memberikan dorongan dan semangat untuk saya sehingga termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Buat Deppy Krisanila, terima kasih atas dukungan dan bantuannya yang selalu menemani dan memberi semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Buat teman-teman yang mengatas namakan 'Hipster' yaitu: Aprean, Titok, Cahya, Dovi, Pendek, Yogi, Robby, Grandies, iyo', terimakasih atas dukungan kalian.
11. Buat anak-anak kontrakan E.204, H.227, E.202, dan E.718 yang membuat saya bisa bercanda gurau, senang atau susah bersama. Terimakasih buat dukungan kalian.
12. Semua pihak yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu per satu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian laporan ini.

Dalam hal penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran, pendapat dan kritik dari pembaca yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga isi skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

Malang, April 2012

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
ABSTRAKSI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	12
2.1. Landasan Teori	12
2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi	12
2.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Solow	14
2.1.1.2 Model Harrod-Domar	17
2.1.2 Desentralisasi Fiskal.....	20
2.1.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	26
2.1.4. Pendapatan Asli Daerah	27
2.1.5 Dana Alokasi Umum.....	29
2.1.6 Investasi.....	32



2.1.7 Penanaman Modal Asing (PMA)	35
2.1.8 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	37
2.2. Penelitian Terdahulu	37
2.3 Kerangka Berpikir.....	43
2.4 Hipotesis	44

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian	46
3.2. Jenis Penelitian	46
3.3. Definisi Operasional	46
3.4. Jenis dan Sumber Data	48
3.5. Teknik Pengumpulan Data	49
3.6 Spesifikasi Model	49
3.7 Pengujian Pemilihan Model Regresi Panel	50
3.7.1 Uji Chow	50
3.7.2 Uji Hausman.....	51
3.7.3 Uji Glejser.....	52
3.8 Uji Asumsi Klasik	52
3.8.1 Uji Normalitas.....	52
3.8.2 Uji Multikolinieritas	52
3.9 Uji Statistik	53
3.9.1 Koefisien Determinasi	53
3.9.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)	53
3.9.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	54

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	56
4.2 Deskripsi Variabel Penelitian.....	57
4.2.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	57
4.2.2 Gambaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	59
4.2.3 Gambaran Dana Alokasi Umum (DAU).....	61
4.2.4 Investasi	62
4.3. Analisis dan Pembahasan Statistik.....	64
4.3.1 Model Regresi Panel	64
4.3.2 Pemilihan Model Regresi Panel	65
4.3.3 Estimasi Model Regresi Panel	68
4.4 Pembahasan Ekonomi.....	75
4.4.1 Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	75
4.4.2 Hubungan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	77
4.4.3 Hubungan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi....	78
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	81
5.1. Kesimpulan	81
5.2. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal.
1.1	Investasi (PMA dan PMDN) Jawa Timur tahun 2005-2009	7
2.1	Penelitian Terdahulu.....	41
4.1	Hasil Uji Chow.....	65
4.2	Hasil Uji Hausman.....	67
4.3	Hasil Uji Glejser.....	68
4.4	Estimasi intersep α 01 Pada <i>Fixed Effect Model Cross-Section Weig</i>	69
4.5	Hasil Uji Normalitas	70
4.6	Hasil Uji Multikolinieritas Menggunakan Analisis Korelasi.....	71
4.7	Hasil Uji Parsial	72
4.8	Hasil Uji Simultan.....	72
4.9	Hasil Uji Kausalitas Granger Pertumbuhan Ekonomi dan PAD.....	73
4.10	Hasil Uji Kausalitas Granger Pertumbuhan Ekonomi dan DAU.....	74
4.11	Hasil Uji Kausalitas Granger Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi.....	74

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal.
1.1	Perkembangan PAD dan DAU Jawa Timur.....	5
1.2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Timur	9
2.1	Output Steady State dan Investasi	16
2.2	Komponen Penerimaan Daerah di Era Desentralisasi Fiskal	25
2.3	Revisi UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	31
2.4	Kerangka Pemikiran	44
4.1	Peta Administratif Provinsi Jawa Timur	56
4.2	Pertumbuhan Ekonomi di Setiap Kota/Kabupaten di Jawa Timur tahun 2005-2006 (persen).....	58
4.3	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota/Kabupaten Jawa Timur tahun 2005-2009	60
4.4	Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Jawa Timur pada tahun 2005-2009 (juta rupiah).....	61
4.5	Perkembangan Jumlah Proyek Investasi (tahun)	62
4.6	Perkembangan Nilai Proyek Investasi (tahun).....	63

ABSTRAKSI

**"Analisis Pengaruh PAD, DAU dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Timur pada Masa Desentralisasi Fiskal"
(Studi Kasus di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur)**

**Di Susun Oleh :
Nasrul Hasan Amarulloh Noer (0710213039)**

**Pembimbing:
DR. Susilo, SE., MS.**

Pada masa sebelum pelaksanaan otonomi daerah, Indonesia menganut sistem pemerintahan yang sentralistik. Dampak ketergantungan daerah pada pusat ini yaitu tidak berkembangnya desentralisasi keuangan daerah dan ketidakberdayaan masyarakat lokal untuk mengatur rumah tangganya sendiri Sebagai langkah reformasi dan proses demokratisasi pemerintah secara resmi mulai melaksanakan Undang-Undang no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang no. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah. Desentralisasi fiskal adalah salah satu pendukung pelaksanaan otonomi daerah karena kemampuan keuangan daerah merupakan hal yang harus diperhitungkan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Keputusan menerapkan desentralisasi fiskal menuntut adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat pengaruh pada pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi pada masa desentralisasi fiskal di kota/kabupaten Provinsi Jawa Timur. Ruang lingkup di dalam penelitian ini 38 kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur, beberapa variabel yang digunakan sebagai analisis yaitu: pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi satu dalam investasi, pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependent. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Badan Penanaman Modal Jawa Timur, dan *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan*. Data tersebut merupakan data *cross section* dan *time series* selama kurun waktu 5 tahun (2005-2009).

Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan semua variabel signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur yaitu variabel PAD, DAU dan Investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

Kata kunci : Pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU dan Investasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa sebelum pelaksanaan otonomi daerah, Indonesia menganut sistem pemerintahan yang sentralistik. Hal tersebut tercermin dari adanya dominasi pemerintah pusat dalam merencanakan dan menetapkan prioritas pembangunan di daerah, serta kurang melibatkan *stakeholders* di daerah. Kebijakan dan tugas umum pembangunan daerah sangat dominan dipegang oleh pemerintah pusat baik dalam perencanaan maupun implementasi pembangunan. Prioritas pembangunan daerah selalu diarahkan untuk mendukung kesuksesan prioritas pembangunan nasional. Karena itu sebagian besar pembiayaan pembangunan daerah ditentukan oleh pemerintah pusat. Pemerintahan yang sentralistik ini melahirkan ketergantungan pemerintah daerah dan ketimpangan pembangunan antar daerah di Indonesia. Sistem pengaturan keuangannya adalah model pengaturan keuangan yang sangat sentralistik dan lebih menguntungkan pemerintah pusat. Dampak ketergantungan daerah pada pusat ini yaitu tidak berkembangnya desentralisasi keuangan daerah dan ketidakberdayaan masyarakat lokal untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Sebagai langkah reformasi dan proses demokratisasi pemerintah secara resmi mulai melaksanakan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah. Undang-undang ini merefleksikan pembagian kekuasaan di bidang pemerintahan yang lebih luas kepada daerah, memberikan kepastian sumber dana pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya, serta kebebasan dalam menggunakan dana-dana tersebut sesuai dengan fungsinya. Menurut UU No 32 Tahun 2004, konsekuensi otonomi daerah adalah

penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya sendiri, termasuk dalam hal penentuan sektor-sektor pembangunan yang paling tepat dan dibutuhkan masyarakat lokal.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dikenal dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, merupakan pijakan hukum atas implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia. Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, maka akan terjadi perluasan wewenang pemerintah daerah. Sedangkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 akan tercipta peningkatan kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, otonomi daerah diharapkan bisa menjadi jembatan bagi pemerintah daerah untuk mendorong efisiensi ekonomi, efisiensi pelayanan publik sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal melalui berbagai efek multiplier dari desentralisasi yang diharapkan bisa terwujud.

Inti dari desentralisasi adalah demokratisasi dan pemberdayaan. Otonomi daerah sebagai perwujudan dari demokratisasi maksudnya adalah adanya kesetaraan hubungan antara pusat dan daerah, di mana daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan, kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. Sedangkan otonomi daerah sebagai wujud dari pemberdayaan daerah merupakan suatu proses pembelajaran dan penguatan bagi daerah untuk mampu mengatur, mengurus dan mengelola kepentingan dan aspirasi masyarakatnya sendiri. Dengan demikian, daerah secara bertahap akan berupaya untuk mandiri dan melepaskan diri dari ketergantungan kepada pusat.

Desentralisasi fiskal adalah salah satu pendukung pelaksanaan otonomi daerah karena kemampuan keuangan daerah merupakan hal yang harus diperhitungkan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal,

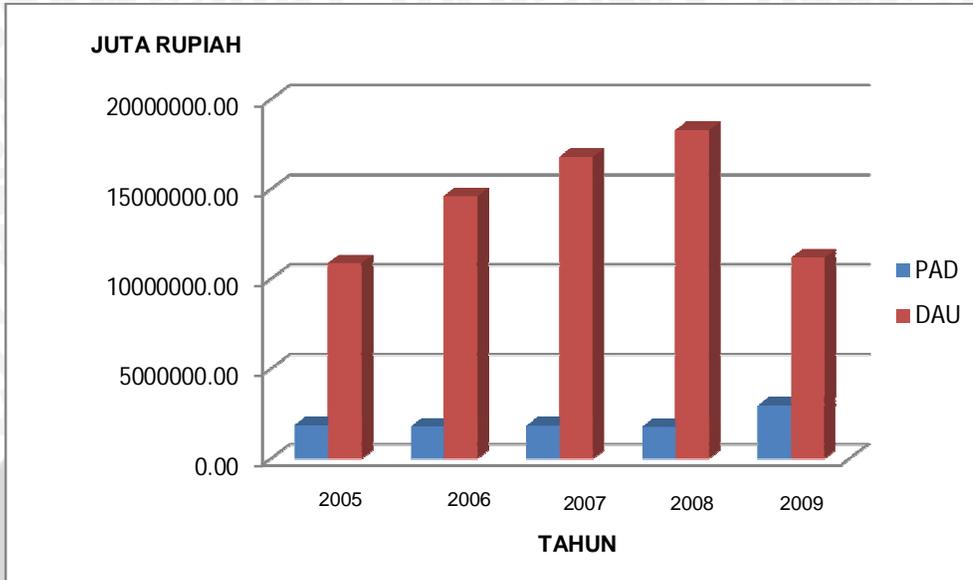
pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Diharapkan dengan adanya otonomi dan desentralisasi fiskal dapat lebih pemeratakan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah untuk mengembangkan wilayah menurut potensi masing-masing. Desentralisasi fiskal akan memberikan manfaat yang optimal jika diikuti oleh kemampuan finansial yang memadai oleh daerah otonom. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana bagi hasil, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Indikator penting keberhasilan kemampuan keuangan daerah tercermin dalam kemampuan suatu daerah dalam menggali pendapatan asli daerah (PAD) nya untuk membiayai belanja rutin dan pembangunan di daerah tersebut. Dilain pihak sebagai daerah otonom yang tetap menjadi bagian dari negara kesatuan, daerah masih harus tetap melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan pemerintah pusat. Kewenangan untuk melaksanakan tugas tersebut tentu saja disertai dengan pembiayaan dan bantuan dari pusat. Selain itu, kemampuan suatu daerah, khususnya kabupaten dan kota dalam melaksanakan fungsi otonominya tidak sama satu dengan yang lain. Di satu pihak beberapa daerah tergolong sebagai daerah yang beruntung karena memiliki sumber-sumber penerimaan yang potensial. Di lain pihak, banyak kabupaten dan kota yang memiliki kemampuan dan keuangan yang kurang memadai, mengakibatkan daerah ini mengalami kesulitan dalam pembiayaan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerahnya. Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan transfer dari pemerintah pusat.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan PDRB tertinggi kedua setelah DKI Jakarta, sehingga sering di katakan Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi penggerak roda perekonomian di kawasan timur Indonesia. Selain itu Provinsi Jawa Timur mempunyai daerah terluas dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa yaitu 36.9% serta jumlah kota/kabupaten terbanyak yaitu 38 daerah. Kondisi kabupaten/ kota di Jawa Timur mempunyai karakteristik, sumber daya dan struktur keuangan yang sangat berbeda antar satu daerah dengan lainnya. Oleh karena itu, pemerintah Jawa Timur beserta partisipasi masyarakatnya dengan memanfaatkan keberadaan sumberdaya yang ada, diharapkan dapat menggali sumber-sumber potensi daerah dalam rangka peningkatan penerimaan pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi dari sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan dalam merancang dan membangun perekonomian di daerahnya.

Berdasarkan data keuangan daerah Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu 2005-2009, terlihat bahwa proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) masih besar proporsi DAU-nya. Dari gambar 1.1 terlihat bahwa proporsi DAU lebih besar dibandingkan PAD-nya. Hal ini menunjukkan masih belum optimalnya Provinsi Jawa Timur dalam menggali sumber daya dan potensi yang ada sehingga masih adanya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan.

Gambar 1.1 : Perkembangan PAD dan DAU Jawa Timur tahun 2005-2009 (juta rupiah)



Sumber : DJPK, 2010 (diolah)

Desain perimbangan keuangan antara pusat dan daerah menggunakan prinsip *money follow function* atau uang mengikuti kewenangan. Artinya, jika kewenangan dilimpahkan ke daerah maka uang untuk mengelola kewenangan pun harus dilimpahkan ke daerah. Dengan demikian, daerah menjadi mampu untuk melaksanakan segala urusannya sendiri sebab sumber-sumber pembiayaan juga sudah diserahkan. Apabila terjadi pergeseran wewenang fiskal dan tanggungjawab dari pemerintah pusat ke tingkat yang lebih rendah, dalam hal ini pemerintah daerah diberikan kebebasan dalam melaksanakan fungsi dan tanggungjawabnya serta pengambilan keputusan penyediaan pelayanan pada sector publik, maka secara tidak langsung dapat berpengaruh positif terhadap pelaksanaan pembangunan ekonomi di daerah. Hal ini di sebabkan pemerintah daerah dapat berhubungan langsung dalam melayani rakyatnya dimana pemerintah mengerti kondisi daerahnya sendiri.

Seperti yang di sebutkan diatas bahwa ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonom yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah menjadi bagian sumber keuangan terbesar. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ada beberapa faktor yang perlu diberdayakan diantaranya adalah investasi.

Investasi sebagai salah satu komponen penting dari permintaan *agregat* di dalam ekonomi merupakan faktor yang sangat krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi dalam negeri (*sustainable development*). Proses pembangunan ekonomi dalam negeri melibatkan kegiatan produksi (barang dan jasa) di semua sektor ekonomi domestik untuk keperluan kegiatan-kegiatan tersebut, perlu dibangun pabrik-pabrik, gedung perkantoran, mesin dan alat-alat produksi. Selain itu juga perlu disiapkan tenaga kerja atau sumber daya manusia (SDM) yang terampil untuk pengadaan semua itu, termasuk fasilitas seperti gedung sekolah, perpustakaan dan sebagainya buat mendukung penyiapan SDM, diperlukan dana yang disebut dana investasi (Tambunan, 2001). Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa total investasi yang diperoleh Jawa Timur memiliki angka yang cukup besar, namun hanya pada tahun 2006 yang memiliki angka cukup besar daripada tahun-tahun yang lain yaitu sebesar Rp.331.597.633.000.000,- untuk jumlah PMA dan PMDN. Hal ini menunjukkan bahwa Jawa Timur masih menjadi prioritas untuk beinvestasi yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan daerahnya yang merupakan sumber keuangan daerah.

Tabel 1.1 : Investasi (PMA dan PMDN) Jawa Timur tahun 2005-2009
(juta rupiah)

TAHUN	INVESTASI	
	PMA (JUTA)	PMDN (JUTA)
2005	567.693	6.243.278
2006	2.032.882	329.564.751
2007	977.949	17.433.368
2008	4.304.119	19.709.040
2009	203.8931	4.175.8855

Sumber : BPM Jawa Timur, 2010 (diolah)

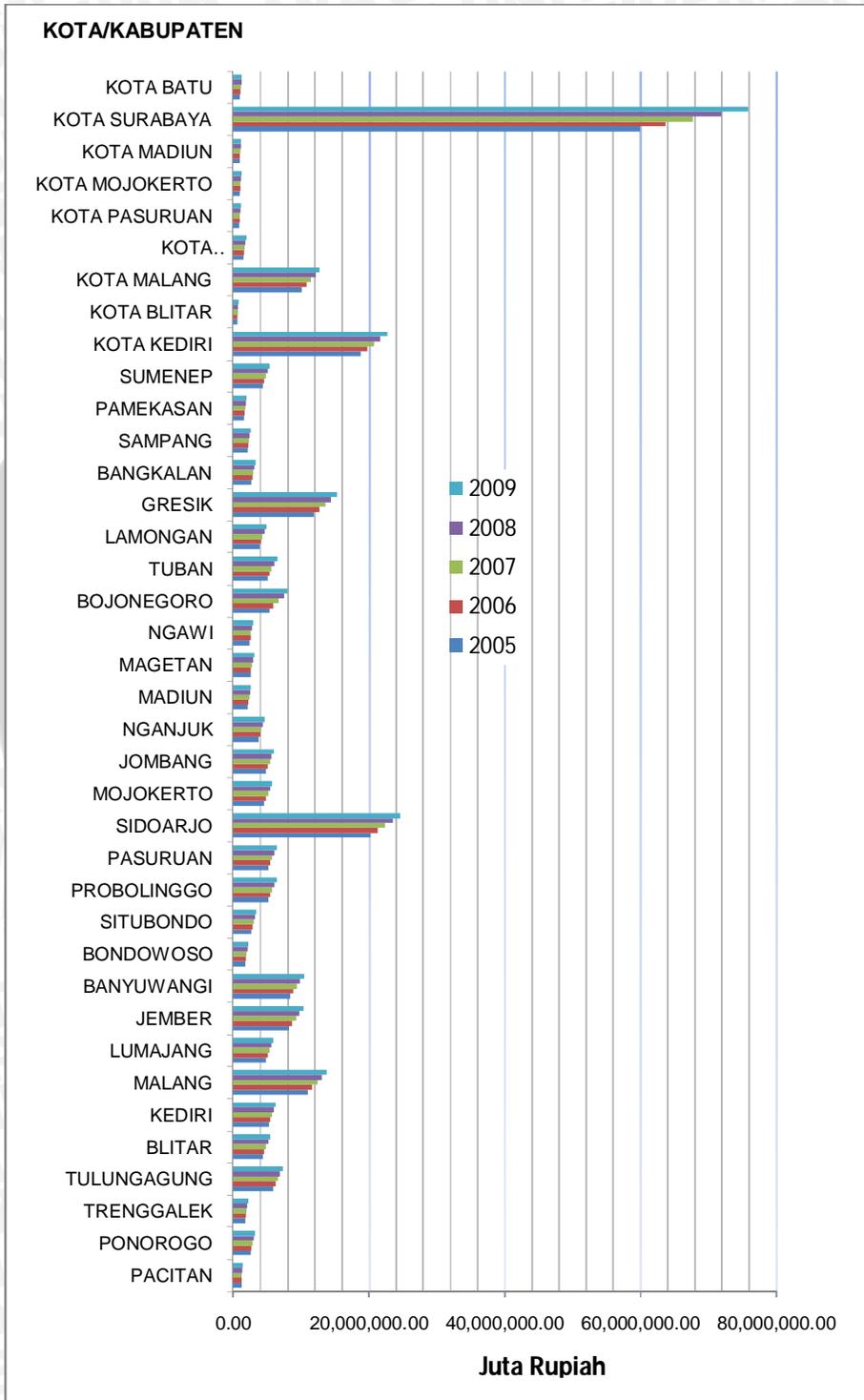
Dari pelaksanaan desentralisasi selama ini, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan pada umumnya adalah ketidakcukupan sumber daya keuangan. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mempunyai finansial yang cukup dan lebih leluasa dalam mengelola keuangannya. Dalam pemberian wewenang itu sendiri harus meliputi kewenangan dalam mengelola keuangan. Keputusan menerapkan desentralisasi fiskal menuntut adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Berdasarkan teori *Tiebout Model* yang menjadi landasan konsep desentralisasi fiskal, bahwa dengan adanya pelimpahan wewenang akan meningkatkan kemampuan daerah dalam melayani kebutuhan barang publik dengan lebih baik dan efisien.

Penyebab mendasar dari peningkatan kemampuan tersebut adalah karena pemerintah daerah dipandang lebih mengetahui kebutuhan dan karakter masyarakat lokal, sehingga program-program dari kebijakan pemerintah akan lebih efektif untuk dijalankan. Pengeluaran untuk infrastruktur dan sektor sosial yang mungkin akan lebih

efektif dalam mempertinggi pembangunan ekonomi. Pelayanan publik yang lebih bagus akan mampu menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dengan infrastruktur dan pelayanan publik yang baik maka efisiensi, efektifitas dan produktifitas ekonomi akan tercapai sehingga investor juga akan mengalir ke daerah sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat yang bisa dilihat dari meningkatnya aktivitas ekonomi daerah. Namun harapan itu belum optimal yang tercermin dalam pertumbuhan *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB). Pertumbuhan PDRB riil menunjukkan variasi antar daerah di Jawa Timur setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota/kabupaten di Jawa Timur dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini.



Gambar 1.2 : PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2009



Sumber : BPS, Jawa Timur

Pada gambar 1.2 bisa dilihat bahwa pada kurun waktu 2005 – 2009 belum semua kabupaten/kota di Jawa Timur menunjukkan kinerja ekonomi yang baik. Dari tahun 2005 – 2009 di mana era pelaksanaan desentralisasi fiskal ternyata hanya kabupaten dan kota tertentu yang memiliki PDRB tinggi yaitu: Kota Kediri, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya. Kota Surabaya memiliki angka PDRB tertinggi di Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 59,877,994.44 pada tahun 2005, sebesar 63,677,389.53 pada tahun 2006, sebesar 67,695,819.92 pada tahun 2007, sebesar 71,913,820.46 pada tahun 2008, dan sebesar 75,892,973.48 pada tahun 2009.

Hal ini menunjukkan bahwa era desentralisasi fiskal di mana daerah diberi kewenangan dalam mengatur keuangan daerahnya ternyata banyak kabupaten/kota di Jawa Timur yang belum menunjukkan perubahan yang signifikan dalam PDRB-nya meskipun PDRB bukan satu-satunya indikator dalam pembangunan. Dengan kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah serta kinerja pemerintah guna mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang lebih baik.

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka judul dalam penelitian ini yaitu **“Analisis Pengaruh PAD, DAU, dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada Masa Desentralisasi Fiskal”**.

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan penting yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh PAD, DAU, dan Investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di kota/kabupaten Provinsi Jawa Timur pada masa desentralisasi fiskal?

2. Variable apa yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota/kabupaten Provinsi Jawa Timur pada masa desentralisasi fiskal?

1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat diambil beberapa tujuan dari penelitian ini. beberapa tujuan penting dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh PAD, DAU, dan Investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di kota/kabupaten Provinsi Jawa Timur pada era desentralisasi fiskal
2. Menganalisis variable apa yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota/kabupaten Provinsi Jawa Timur pada era desentralisasi fiskal

1.3. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi peneliti dan peneliti selanjutnya.
Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti maupun bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan desentralisasi fiskal.
2. Manfaat bagi pemerintah.
Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Jawa Timur atau pihak-pihak terkait untuk dipertimbangkan dalam pengambil keputusan dan perencanaan pembangunan daerah menyakut keuangan daerah dan kinerja ekonomi dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Jawa Timur

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Tulus Tambunan (2001), pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Selain dari sisi permintaan (konsumsi), dari sisi penawaran, pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja (sumber pendapatan). Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian penambahan pendapatan tersebut (*ceteris paribus*), yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan. Pemenuhan kebutuhan konsumsi dan kesempatan kerja itu sendiri hanya bisa dicapai dengan peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau PDB yang terus menerus.

Menurut Sadono Sukirno (2006), pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang telah dicapai pada periode waktu sebelumnya sedangkan laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan dalam Produk Regional Bruto (PDRB), tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil daripada tingkat pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan ekonomi dari sudut tinjauan ekonomi dapat direfleksikan oleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Variabel ini sering digunakan untuk mengukur seberapa baik ekonomi suatu Negara sudah dikelola dengan benar. Menurut Mankiw (2003), PDB dapat dipandang dalam dua hal. Pertama, total pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam perekonomian. Kedua, adalah total pengeluaran atas produk barang dan jasa dalam ekonomi.

Todaro dan Smith (2003) mengidentifikasi bahwa terdapat tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, yaitu:

1. Akumulasi modal

Akumulasi modal (*capital accumulation*) terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Pengadaan pabrik baru, mesinmesin dan peralatan dan bahan baku meningkatkan stok modal (*capital stock*) fisik suatu Negara yakni total nilai riil *netto* atas seluruh barang modal produktif secara fisik dan hal itu jelas memungkinkan terjadinya peningkatan output di masa-masa yang akan datang.

2. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan meningkatkan tenaga kerja produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya.

3. Kemajuan Tehnologi

Kemajuan tehnologi bagi kebanyakan ekonom merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang terpenting. Dalam pengertiannya yang paling sederhana, kemajuan

tehnologi terjadi karena ditemukannya cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan tradisional.

Ketiga faktor di atas juga menjadi determinan penting dalam teori pertumbuhan ekonomi yang dikenal sebagai model pertumbuhan Solow (*Solow Growth Model*). Model ini dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan tehnologi berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu Negara secara keseluruhan (Mankiw, 2003).

2.1.1.1 Model Pertumbuhan Ekonomi Solow

Dalam model Solow (Mankiw, 2003) output atau jumlah barang yang dihasilkan dalam perekonomian tergantung pada persediaan modal dan tenaga kerja melalui sebuah fungsi produksi yang memiliki skala hasil konstan.

$$Y = F(K, L)$$

Berdasarkan asumsi skala hasil konstan maka dengan membagi kedua sisi persamaan dengan L (pekerja) maka dapat juga diidentifikasi bahwa output per pekerja merupakan fungsi dari modal per pekerja, yaitu $Y/L = F(K/L, 1)$, dan selanjutnya dapat ditulis persamaan $y = f(k)$, yang menggambarkan bahwa output per pekerja merupakan fungsi dari modal per pekerja.

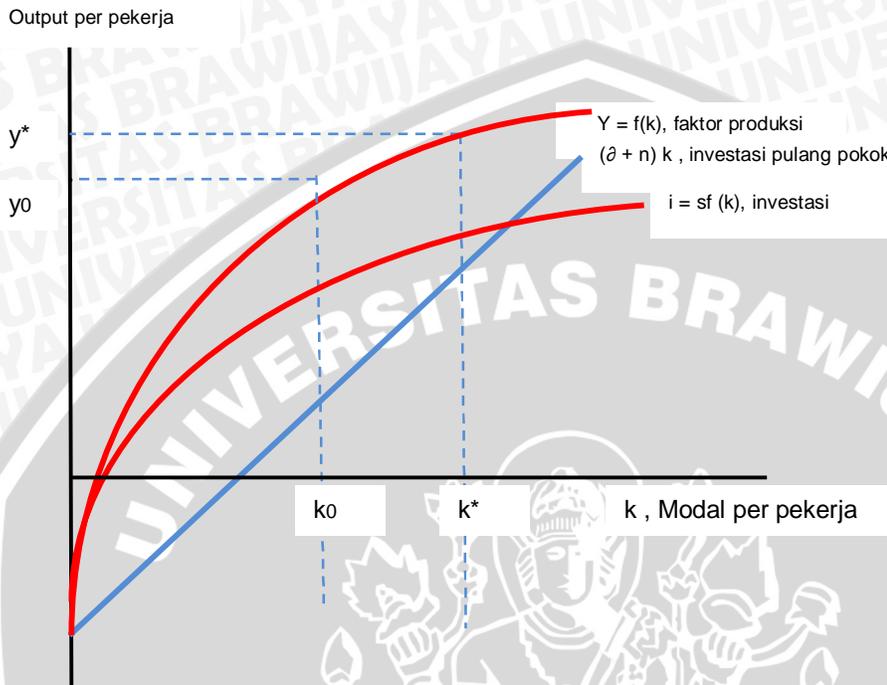
Persediaan modal menjadi determinan output perekonomian yang penting, karena persediaan modal bisa berubah sepanjang waktu, dan perubahan itu bias mengarah ke pertumbuhan ekonomi. Dua kekuatan utama yang mempengaruhi persediaan modal adalah investasi dan depresiasi. Dalam jangka panjang persediaan modal ini akan menuju suatu tingkat modal pada kondisi mapan (*Steady state level of capital*), yaitu di mana dalam perekonomian berlaku tingkat investasi sama dengan depresiasi sehingga perubahan persediaan modal (k) dan output $f(k)$ adalah tetap.

Notasi yang umumnya digunakan untuk menunjukkan kondisi ini adalah k^* . Dalam Model Solow dasar ini juga ditunjukkan bagaimana akumulasi modal dengan sendirinya tidak bisa menjelaskan pertumbuhan yang berkelanjutan. Artinya meski dalam jangka pendek terjadi pertumbuhan output, tetapi pada akhirnya mendekati kondisi mapan dimana modal dan output adalah konstan (Mankiw, 2003)

Menurut Solow pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi merupakan variabel lainnya yang turut mempengaruhi output dan perekonomian suatu Negara. Sebagaimana depresiasi yang mengurangi persediaan modal per pekerja, pertumbuhan pendudukpun akan menyebabkan hal yang sama. Artinya semakin besar jumlah penduduk, maka semakin kecil jumlah modal per pekerja dan berdampak pada rendahnya output per pekerja. Untuk mencapai kondisi mapan, maka dalam perekonomian memerlukan tingkat investasi yang dapat mengoffset pengaruh depresiasi dan pertumbuhan penduduk, atau yang disebut investasi pulang pokok (*break event investment*), yaitu $\Delta k = i - (\delta + n) k$, sebagaimana gambar di bawah ini;



Gambar 2.1 : Output Steady State dan Investasi



Sumber : Mankiw, 2003

Satu hal yang penting di sini adalah bahwa meskipun dalam kondisi mapan modal dan output per pekerja adalah konstan, namun dalam perekonomian sesungguhnya output total dan modal total tetap bertambah dari waktu ke waktu. Sedangkan kemajuan teknologi menurut Solow merupakan variabel eksogen yang meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memproduksi sepanjang waktu. Kemajuan teknologi ini direfleksikan dengan apa yang disebutnya sebagai efisiensi tenaga kerja, yaitu mencerminkan pengetahuan masyarakat tentang metode-metode produksi; ketika teknologi mengalami kemajuan, efisiensi tenaga kerja meningkat (Mankiw, 2003). Dengan demikian, berdasarkan model Solow ini, secara bersama-sama pertumbuhan modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi memiliki kontribusi penting dalam menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu Negara.

2.1.1.2 Model Pertumbuhan Ekonomi Harrod-Domar

Harrod dan Domar menekankan pentingnya peranan akumulasi kapital dalam proses pertumbuhan. Harrod dan Domar menitikberatkan bahwa akumulasi kapital itu mempunyai peranan ganda, yaitu menimbulkan pendapatan dan disamping itu juga menaikkan kapasitas produksi dengan cara memperbesar persediaan kapital.

Teori Harrod-Domar menunjukkan bahwa jawaban kepada persoalan ini relatif sederhana, yaitu agar seluruh barang modal yang tersedia digunakan sepenuhnya, permintaan agregat haruslah bertambah sebanyak kenaikan kapasitas barang-barang modal yang terwujud sebagai akibat dari investasi di masa lalu. Dalam perekonomian dua sektor pertumbuhan perbelanjaan agregat terutama harus terwujud dari kenaikan investasi. Untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang teguh, investasi harus terus menerus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Sekiranya keadaan ini tidak berlaku, pertumbuhan ekonomi akan mengalami perlambatan dan mungkin akan menghadapi resesi (Sukirno, 2007).

Model pertumbuhan Harrod-Domar menjelaskan bahwa investasi didalam proses pertumbuhan ekonomi memiliki peranan yang sangat menentukan, khususnya watak ganda yang dimiliki investasi yaitu (Jhingan, 1993) :

- a. Menciptakan pendapatan yang disebut sebagai dampak permintaan.
- b. Memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal yang sering disebut sebagai dampak penawaran investasi. Selama investasi netto tetap berlangsung pendapatan nyata dan output akan senantiasa membesar.

Model yang dikembangkan oleh Harrod-Domar yaitu (Jhingan, 1993) :

1. Model Domar

Domar mendasarkan modelnya pada pertanyaan bahwa investasi di satu pihak menghasilkan pendapatan dan di pihak lain menaikkan kapasitas produksi, maka investasi harus meningkat agar kenaikan pendapatan sama dengan kenaikan kapasitas produksi, supaya keadaan *full employment* dapat dipertahankan. Melalui pendekatan dengan mempererat kaitan antara penawaran dengan permintaan agregat melalui investasi.

Domar menjelaskan kenaikan kapasitas produksi sisi penawaran dianggap sebagai laju pertumbuhan tahunan dari investasi. Kapasitas produksi yang baru diinvestasikan rata-rata sama dengan tabungan. Tetapi sebagian investasi baru akan menggambarkan investasi lama. Karena itu, investasi baru akan bersaing dengan investasi lama di pasar tenaga kerja dan faktor-faktor produksi lain. Hasil output pabrik lama akan berkurang dan kenaikan output tahunan dari perekonomian sedikit lebih kecil daripada kapasitas produksi yang baru diinvestasikan.

Kenaikan yang diperlukan dalam permintaan agregat di sisi permintaan dalam model Domar menjelaskan bahwa multiplier Keynesian akan terjadi. Misalnya kenaikan rata-rata pendapatan (Y), sedangkan kenaikan investasi sama dengan multiplikator ($1/\alpha$) kali kenaikan investasi. ($\Delta Y = I / 1/\alpha$). Untuk mempertahankan equilibrium pendapatan pada full employment, permintaan agregat harus sama dengan penawaran agregat. Dengan demikian persamaan akan berubah menjadi $\Delta I / 1/\alpha = I\sigma$. Persamaan ini menunjukkan bahwa untuk mempertahankan *full employment*, laju pertumbuhan investasi *autonomus netto* ($\Delta I/I$) harus sama dengan marginal propensity to saving kali produktivitas modal ($\alpha \times \sigma$). Ini batas laju kecepatan investasi yang diperlukan untuk menjamin penggunaan kapasitas potensial dalam rangka mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang mantap pada keadaan *full employment*.

2. Model Harrod

Model Harrod didasarkan pada tiga laju pertumbuhan yaitu :

- a. Laju pertumbuhan aktual (G) ditentukan oleh ratio tabungan dalam ratio output.

Laju pertumbuhan akan menunjukkan variasi klasik jangka pendek dalam laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan terjamin (GW) merupakan laju pertumbuhan pendapatan kapasitas penuh suatu perekonomian.

- b. Laju pertumbuhan alamiah (Gr) oleh Harrod dianggap sebagai " optimum kesejahteraan " dapat juga disebut sebagai laju pertumbuhan potensial.

Laju pertumbuhan aktual dalam model adalah $G = S$. Dimana G adalah laju pertumbuhan output periode waktu tertentu dan dapat dinyatakan sebagai $\Delta Y/Y$ adalah tambahan netto terhadap modal, yang didefinisikan sebagai ratio investasi terhadap kenaikan pendapatan, yaitu $I/\Delta Y$ dan S adalah kecenderungan menabung rata-rata yaitu Y/S . Dengan memasukkan ratio ini ke dalam persamaan di atas kita peroleh persamaan sebagai berikut; $\Delta Y/Y \times I/\Delta Y = S/Y$ atau $I/Y = S/Y$ atau $I=S$.

Laju pertumbuhan terjamin menurut Harrod adalah laju pertumbuhan dimana para produsen merasa puas atas apa yang dikerjakan. Ini merupakan equilibrium usaha yang merupakan garis kemajuan yang apabila tercapai akan memuaskan para penerima laba, bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang benar. Jadi, laju pertumbuhan ini berkaitan dengan tingkah laku pengusaha. Pada laju pertumbuhan terjamin ini permintaan dianggap cukup tinggi oleh para pengusaha untuk menjual apa yang diproduksi, dan mereka akan terus memproduksi dengan persentase laju pertumbuhan yang sama, dan ini merupakan lintasan di mana penawaran dan permintaan barang dan jasa akan tetap berada dalam equilibrium berdasarkan kecenderungan tertentu. Dimana persamaan laju pertumbuhan terjamin berubah menjadi $G_w + C_r = S$. Dimana G_w merupakan laju pertumbuhan terjamin atau laju

pertumbuhan pendapatan dalam kapasitas penuh yang akan sepenuhnya memanfaatkan stok modal yang sedang membengkak, sehingga memuaskan para pengusaha atau jumlah investasi yang mereka tanam. Jadi, G_w dalam hal ini adalah nilai $\Delta Y/Y \times Cr$ (modal yang mereka butuhkan).

Laju pertumbuhan alamiah adalah laju kemajuan dimana pertumbuhan penduduk dan perbaikan teknologi berjalan lambat. Laju ini tergantung dari variabel-variabel makro, seperti : penduduk, teknologi, sumber alam dan peralatan modal. Dengan kata lain, ini merupakan laju pertumbuhan output data, pekerjaan penuh yang ditentukan oleh laju pertumbuhan dan laju perkembangan teknologi. Dimana untuk penambahan alamiah ini adalah $G_n + Cr \neq S$. Dimana G_n adalah laju pertumbuhan pekerjaan penuh alamiah.

2.1.2 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi (otonomi daerah) adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya dijelaskan bahwa daerah tersebut disebut daerah dengan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengurus kepentingan masyarakat di daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan NKRI. Pengertian ini dijelaskan lagi dengan UU No 33 tahun 2004 yang berisi tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, desentralisasi (otonomi daerah) merupakan suatu masyarakat lokal yang mempunyai peran signifikan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan erat dengan arah dan tujuan pembangunan masyarakat lokal itu sendiri.

Pada hakekatnya pelaksanaan otonomi daerah merupakan penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah untuk mengelola potensi yang ada di daerah, yang diikuti dengan penyerahan personil, prasarana, pembiayaan, dan dokumen. Selain itu hubungan keuangan antara pusat dan daerah menyangkut masalah keadilan diwujudkan dengan alokasi dana bagi hasil, sedangkan pemerataan diimplementasikan dengan dana alokasi umum dan pembagian sumberdaya yang ada.

Secara umum konsep desentralisasi pada dasarnya terdapat empat jenis desentralisasi (Sidik, 2002) dikutip dari (Ahmad, 2011), yaitu:

1. Desentralisasi politik (*political decentralization*), yaitu pemberian hak kepada warga Negara melalui perwakilan yang dipilih suatu kekuasaan yang kuat untuk mengambil keputusan publik.
2. Desentralisasi administrasi (*administrative decentralization*), yaitu pelimpahan wewenang guna mendistribusikan wewenang, tanggung jawab dan sumber-sumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik, terutama yang menyangkut perencanaan, pendanaan dan manajemen fungsi-fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada aparat di daerah, badan otoritas tertentu atau perusahaan tertentu.
3. Desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*) yaitu pelimpahan wewenang dalam mengelola sumber-sumber keuangan, yang mencakup:
 - a. *Self-financing* atau *cost recovery* dalam pelayanan publik terutama melalui pengenaan retribusi daerah.
 - b. *Cofinancing* atau *coproduction*, dimana pengguna jasa berpartisipasi dalam bentuk pembayaran jasa atau kontribusi tenaga kerja.

c. Transfer dari pemerintah pusat terutama berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), sumbangan darurat, serta pinjaman daerah (sumber daya alam)

4. Desentralisasi ekonomi (*economic or market decentralization*), yaitu kebijakan tentang privatisasi dan deregulasi yang intinya berhubungan dengan kebijakan pelimpahan fungsi-fungsi pelayanan masyarakat dari pemerintah kepada sektor swasta sejalan dengan kebijakan liberalisasi dan ekonomi pasar.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitan dengan kebijakan keuangan negara yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, maka dengan kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom.

Prinsip-prinsip utama desentralisasi fiskal menurut Delivery (2005) adalah:

1. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah memberikan wewenang penuh kepada daerah untuk menjalankan pemerintahannya sendiri termasuk menyediakan pelayanan yang berdasar pada prioritas daerah itu sendiri, yang sesuai dengan aspirasi masyarakat serta berjalan di atas rel hukum dan peraturan yang berlaku.

2. Perencanaan *Bottomup*

Perencanaan *Bottomup* akan mengangkat isu penggunaan pendekatan partisipatif oleh pemerintah daerah. Itu dilakukan untuk lebih mendengarkan pendapat masyarakat sasaran dalam proses identifikasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap inisiatif pembangunan sosial dan ekonomi. Dengan memperkenalkan sistem

perencanaan bottomup akan sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat yang dilayaninya dengan melibatkan masyarakat sebagai elemen utama dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.

3. Partisipasi dalam Proses Demokratis

Konteks desentralisasi pemerintah, "partisipasi" mengacu pada anggota masyarakat di dalam menjalankan hak dan tanggung jawabnya melalui proses demokratis. Proses tersebut antara lain berupa partisipasi anggota masyarakat dalam pemerintahan daerah untuk memilih wakilwakil mereka di pemerintah daerah; juga membentuk kelompok-kelompok masyarakat seperti LSM, organisasi para pembayar bea, dan kelompokkelompok pelayanan, di mana keduanya menjadi inisiator program mandiri yang inovatif seperti proyek pengentasan kemiskinan dan melakukan lobi ke pemerintah atas nama anggotanya.

4. Pembangkitan Sumber Sumber Keuangan

Kesuksesan inisiatif desentralisasi dan otonomi daerah ditentukan oleh kapasitas pemerintah daerah untuk membangkitkan sumber-sumber keuangan dan sumber lainnya (seperti personil). Sumber-sumber daya ini dapat berbentuk pemasukan pajak yang diatur oleh pemerintah lokal (pengumpulan pajak daerah) ataupun mentransfer dan menyeimbangkan pembayaran dari pemerintah yang lebih tinggi.

5. Keseimbangan Pembagian Sumber Sumber Daya

Pembagian sumber-sumber daya yang seimbang di antara berbagai tingkatan pemerintahan akan menjamin bahwa daerahdaerah yang kaya akan sumber daya akan memperoleh manfaat dari eksploitasi sumber-sumber daya tersebut, sementara daerahdaerah yang miskin sumber daya akan memperoleh pembagian yang adil dari pendapatan yang dihasilkan.

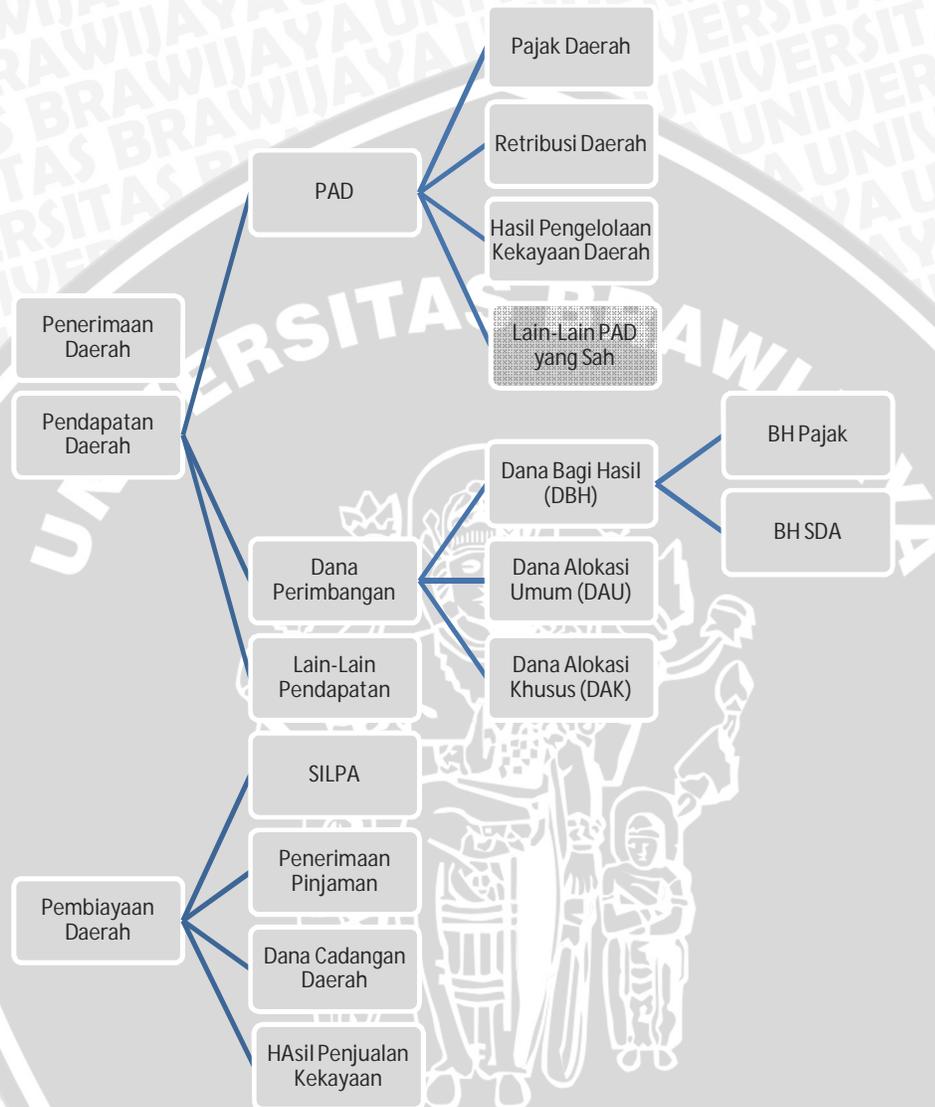
Di Indonesia, pelaksanaan desentralisasi fiskal sebagai salah satu instrument kebijakan pemerintah mempunyai prinsip dan tujuan antara lain (Mardiasmo, 2009) ;

1. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*).
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.
3. Meningkatkan efisiensi peningkatkan sumber daya nasional.
4. Tata kelola, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran.
5. Mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.

Dalam tataran kebijakan yang lebih aplikatif, desentralisasi fiskal tersebut diwujudkan melalui pemberian sejumlah transfer dana langsung dari pemerintah pusat ke daerah dalam rangka memenuhi asas desentralisasi, pemberian dana yang dilakukan oleh kementerian/lembaga melalui mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta memberikan diskresi kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi sesuai dengan kewenangannya. Di banyak Negara yang menganut desentralisasi, kewenangan memungut pajak daerah dan retribusi daerah ini dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat lokal dan memberikan jaminan kepada rakyat bahwa pelayanan public akan semakin membaik dan rakyat akan lebih puas dengan pelayanan yang diberikan.

Secara garis besar penerimaan daerah dalam era desentralisasi fiskal di Indonesia dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.2 : Komponen Penerimaan Daerah di Era Desentralisasi Fiskal



Sumber : UU No 33 Tahun 2004

Mekanisme kebijakan transfer ke daerah, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 33 tahun 2004, diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil (DBH) dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Secara nominal jenis transfer ke daerah dalam bentuk ini tercatat sebagai komponen terbesar dari dana transfer ke daerah (Mardiasmo, 2009). Lebih lanjut mardiasmo menjelaskan bahwa beranjak dari

konsep dasar dan implementasinya dalam desentralisasi fiskal di Indonesia, besarnya transfer dana di daerah seharusnya memiliki korelasi yang positif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta potensi daerah dengan berpedoman Pada UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tersebut maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah antara lain sebagai berikut :

- a. Dalam mengalokasikan anggaran baik rutin maupun pembangunan senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip anggaran berimbang dan dinamis serta efisien dan efektif dalam meningkatkan produktivitas.
- b. Anggaran rutin diarahkan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan.
- c. Anggaran pembangunan diarahkan untuk meningkatkan sektor-sektor secara berkesinambungan dalam mendukung penyempurnaan maupun perbaikan sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan skala prioritas.

Menurut Peraturan Perundang-Undangan Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dalam Pasal disebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Disisi lain keuangan daerah adalah sebagai alat fiskal pemerintah daerah, merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, pemeratakan hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi selain stabilitas sosial politik. Peranan keuangan daerah semakin penting, selain karena keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke daerah berupa DAU dan DAK, tetapi juga karena makin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah dan pemecahannya membutuhkan partisipasi aktif masyarakat daerah. Selain itu, peranan keuangan daerah yang makin meningkat akan mendorong terwujudnya otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab.

Untuk memyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh pereimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang merupakan prasyarat dalam system pemerintahan daerah. Sehubungan dengan itu, maka daerah hendaknya memiliki kewenangan yang luas dan kemampuan yang optimal untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber keuangannya sendiri.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang juga merupakan modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. PAD merupakan usaha daerah

guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat (Widjaja, 1992 dalam Nurjanna, 2008)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber keuangan daerah seperti pajak, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain. Kemampuan daerah dalam membiayai sendiri pembanguann daerahnya masih mengalami kendala berupa rendahnya kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD. Rendahnya angka PAD dapat menunjukkan masih tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat serta menunjukkan masih terbatasnya peran pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Walaupun seberapa besar peranan PAD yang ideal juga masih sulit dijawab karena belum ada pedoman yang pasti untuk menentukan besarnya PAD yang ideal bagi suatu daerah (Munawar Ismail, 2001). Hal ini dikarenakan faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kemandirian daerah terus berkembang.

Widayat (2000) yang di kutip oleh Nurjanna (2008) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya PAD antara lain :

1. Banyak sumber pendapatan kabupaten/kota yang besar tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi, misalnya pajak kendaraan bermotor dan Pajak Bumi dan Bangunan
2. BUMD belum banyak bisa memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan pungutan liar.
4. Adanya kebocoran-kebocoran
5. Biaya pungut yang masih tinggi
6. Banyak peraturan daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan

7. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah.

2.1.5 Dana Alokasi Umum

Mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar persen dari penerimaan dalam negeri). Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

DAU secara definisi merupakan dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil Brodjonegoro (2002) dalam Nurjanna (2008).

Sesuai dengan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep Fiscal Gap, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah (*fiscal needs*) dengan potensi daerah (*fiscal capacity*). Dengan pengertian lain, DAU digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

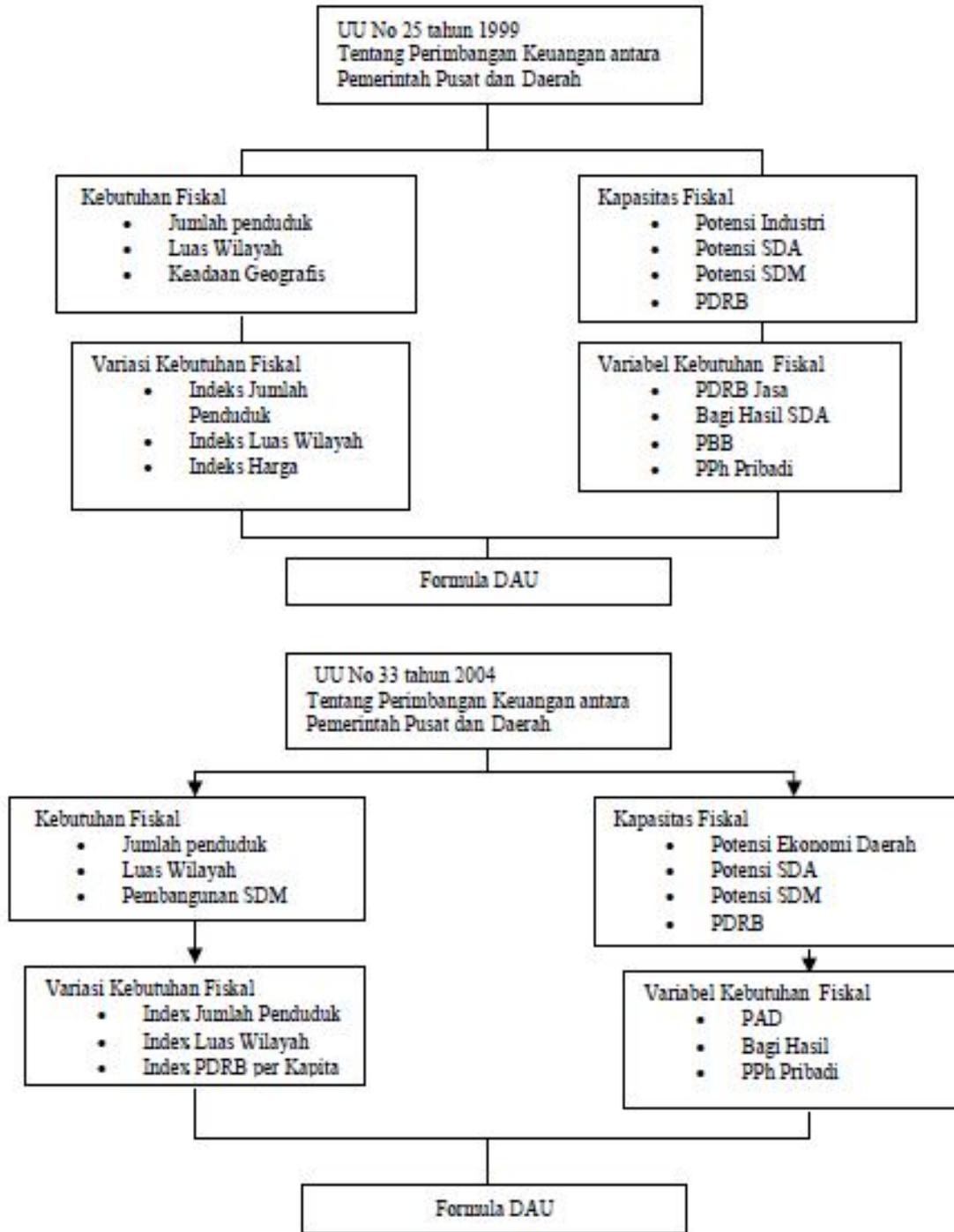
Berdasarkan konsep *fiscal gap* tersebut, distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang

relatif besar. Dengan konsep ini sebenarnya daerah yang *fiskal capasiitasnya* lebih besar dari *fiscal needs* hitungan DAU akan negatif.

Kebutuhan daerah paling sedikit dicerminkan dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografi, dan tingkat pendapatan masyarakat dengan memperhatikan kelompok masyarakat miskin. Sementara potensi ekonomi daerah dicerminkan dengan potensi penerimaan daerah seperti potensi industri, potensi Sumber Daya Alam (SDA), potensi Sumber Daya Manusia, dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). (Saragih, 2003).

Seiring dengan penyesuaian dengan melihat pelaksanaan yang telah dilakukan, formula DAU mengalami revisi melalui UU No 33 tahun 2004 tetapi tidak terlalu drastis. Sejalan dengan amanat UU No 33 tahun 2004 Pasal 27 data daerah yang digunakan untuk mengukur kebutuhan fiskal daerah mengalami perubahan menjadi jumlah penduduk, luas wilayah, PDRB per Kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan kapasitas fiskal diukur dengan data bagi hasil pajak dan bukan pajak serta PAD realisasi. Selanjutnya data jumlah kebutuhan belanja gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah yang sebelumnya digunakan sebagai acuan untuk memperhitungkan faktor penyeimbang dalam formula DAU, berdasarkan UU No 33 tahun 2004 data tersebut digunakan sebagai dasar penghitungan alokasi dasar dalam DAU.

Gambar 2.3: Revisi UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah



Sumber : Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah (2005)

2.1.6 Investasi

Investasi (Penanaman Modal) adalah pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi merupakan tambahan stok barang modal tahan lama yang akan memperbesar peluang produksi di masa mendatang. Salah satu peranan yang sangat penting untuk menjalankan suatu perekonomian adalah investasi, karena merupakan salah satu faktor penentu dari keseluruhan tingkat output dan kesempatan kerja dalam jangka pendek. Apabila penemuan-penemuan baru atau pembebanan pajak yang ringan atau pasar-pasar yang semakin berkembang memberikan insentif bagi investasi-investasi yang ada, yang membuat permintaan agregat meningkat sementara output dan kesempatan kerja tumbuh dengan cepat. Penggunaan tenaga kerja penuh dapat dicapai dengan cara menaikkan jumlah investasi oleh para pengusaha. Bila investasi tidak mencapai tingkat tersebut pengangguran akan berlaku. Investasi juga merupakan pengkaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang. Sekali investasi diputuskan maka perusahaan akan terikat pada jalan panjang di masa yang akan datang yang sudah dipilih, dan yang tidak mudah disimpangi.

Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa depan. Dengan perkataan lain, dalam teori ekonomi investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas memproduksi

sesuatu perekonomian. Pengeluaran untuk mengembangkan pabrik pembuatan kertas, atau pengeluaran untuk mendirikan perkebunan kelapa sawit merupakan penggunaan dana yang dalam teori ekonomi diartikan sebagai investasi (Sukirno,2000).

Investasi merupakan pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Sedangkan menurut Mankiw (2003), investasi (*investment*) terdiri dari barang-barang yang dibeli untuk penggunaan masa depan. Investasi juga dibagi menjadi tiga subkelompok: investasi tetap bisnis, investasi tetap residensial, dan investasi persediaan. Investasi tetap bisnis adalah pembelian pabrik dan peralatan baru oleh perusahaan. Investasi residensi adalah pembelian rumah baru oleh rumah tangga dan tuan tanah. Investasi persediaan adalah peningkatan dalam persediaan barang perusahaan (jika persediaan menurun, investasi persediaan negatif). Investasi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan institusi yang melaksanakan kegiatan investasi serta berdasarkan sumber aliran modal yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Dalam perekonomian daerah, investasi dapat menjadi motor penggerak pengembangan produksi sehingga output yang dihasilkan semakin baik. Dalam ekonomi ada terminologi " *there is no (economic) growth without investment* ". Pernyataan ini mengandung makna bahwa investasi mempunyai peranan penting untuk pembangunan ekonomi, walaupun investasi bukan satu-satunya komponen pertumbuhan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi, investasi mempunyai dua peranan penting dalam makro ekonomi. Pertama, pengaruhnya terhadap permintaan agregat, dan ini akan mendorong output dan kesempatan kerja. Ini dampak atau

peran jangka pendeknya. Kedua, efeknya terhadap pembentukan kapital. Adanya investasi akan menambah berbagai peralatan, mesin, bangunan dan sebagainya (Mudrajad, 2005). Dalam jangka panjang, tindakan ini akan meningkatkan potensi output, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara terus menerus, baik melalui penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA).

Investasi merupakan suatu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi (*suistanable development*), atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pembangunan ekonomi melibatkan kegiatan-kegiatan produksi (barang dan jasa) di semua sektor-sektor ekonomi. Dengan adanya kegiatan produksi, maka terciptalah kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat, yang selanjutnya menciptakan/meningkatkan permintaan di pasar. Pasar berkembang dan berarti juga volume kegiatan produksi, kesempatan kerja dan pendapatan dalam negeri meningkat dan seterusnya. Maka terciptalah pertumbuhan ekonomi (Tambunan, 2001).

Peranan investasi dalam perekonomian yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Suryaningrum (2000), Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dapat dibedakan dalam tiga hal, yaitu : (1) pertumbuhan yang disebabkan oleh modal, (2) pertumbuhan yang disebabkan oleh tenaga kerja, dan (3) pertumbuhan yang disebabkan oleh perubahan dalam produktivitas (Suryaningrum, 2000). Dengan demikian investasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Mengingat pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu faktor penentu dalam posisi perekonomian, maka secara tidak langsung investasi berpengaruh terhadap penerimaan daerah, sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan kualitas produk dan penciptaan lapangan kerja. Melalui investasi, maka kegiatan ekonomi dapat berkembang dan kesejahteraan masyarakat dapat

semakin meningkat. Jadi, investasi merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi bagi suatu perekonomian yang sedang membangun disamping faktor pertumbuhan penduduk dan kemajuan ekonomi.

Menurut Sukirno (2007), kegiatan investasi memungkinkan masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Perannya ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi dalam perekonomian. Yang pertama, investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat. Maka kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional. Peningkatan seperti ini akan diikuti oleh penambahan dalam kesempatan kerja. Yang kedua, penambahan barang modal sebagai akibat dari investasi akan menambahkan kapasitas memproduksi dimasa depan dan perkembangan ini akan menstimulir pertumbuhan produksi nasional dan kesempatan kerja. Ketiga, investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Sumbangan ini akan memberi sumbangan penting atas kenaikan produktivitas dan pendapatan perkapita masyarakat.

2.1.7 Penanaman Modal Asing (PMA)

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1967 ditegaskan bahwa pengertian penanaman modal asing di dalam Undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.

Pengertian modal asing dalam Undang-undang ini menurut pasal 2 ialah :

- a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
- b. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.
- c. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Adapun modal asing dalam Undang-undang ini tidak hanya berbentuk valuta asing, tetapi meliputi pula alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, penemuan-penemuan milik orang/badan asing yang dipergunakan dalam perusahaan di Indonesia dan keuntungan yang boleh ditransfer ke luar negeri tetapi dipergunakan kembali di Indonesia. Selain itu, menurut Krugman dan Obstfeld (2003) PMA adalah arus modal internasional dimana suatu perusahaan di satu negara menciptakan atau memperluas usaha dengan mendirikan cabang di negara lain (Bank Indonesia, 2000)

Sedangkan menurut Irawan dan Suparmoko (1997), investasi asing merupakan investasi yang dilaksanakan oleh pemilik-pemilik modal asing di dalam negeri untuk mendapatkan suatu keuntungan dari usaha yang dilaksanakan itu. Keuntungan dari adanya modal asing ialah akan berupa diolahnya sumberdaya alam, meningkatkannya lapangan kerja dan terjadinya nilai tambah (*added value*), meningkatnya penerimaan negara dari sumber pajak, serta adanya alih teknologi.

2.1.8 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1968 modal dalam negeri diartikan sebagai sumber produktif dari masyarakat Indonesia yang dapat dipergunakan bagi pembangunan ekonomi pada umumnya. Modal dalam negeri adalah modal yang merupakan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda (bergerak dan tidak bergerak), yang dapat disishkan/disediakan untuk menjalankan suatu usaha/perusahaan. (Contoh dari kekayaan termaksud adalah: tanah bangunan, kayu di hutan, dan lain-lain). Kekayaan tersebut dapat dimiliki oleh Negara (Pemerintah) dan swasta, kekayaan yang dimiliki oleh pihak swasta selanjutnya dapat di bagi lagi menjadi;

1. Yang dimiliki oleh swasta nasional (warga-negara Indonesia), baik perorangan maupun badan hukum, termasuk koperasi;
2. Yang dimiliki oleh swasta asing (warga-negara asing), baik perorangan maupun badan hukum.

Yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri ialah penggunaan modal tersebut dalam pasal 1 bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman tersebut dapat dilakukan secara langsung, yakni oleh pemiliknya sendiri, atau tidak langsung, yakni melalui pembelian obligasi-obligasi, surat-surat kertas perbendaharaan negara, emisi-emisi lainnya (saham-saham) yang dikeluarkan oleh perusahaan, serta deposito dan tabungan yang berjangka sekurang-kurangnya satu tahun.

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan, maka ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu bertujuan untuk membandingkan dan memperkuat atas hasil analisis yang dilakukan yang

merujuk dari beberapa studi, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dari penelitian terdahulu yang diambil oleh peneliti, diantaranya lokasi dan variable yang digunakan. Penelitian terkait peran desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi maupun pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan telah banyak dilakukan oleh peneliti. Beberapa diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Hadi Sasana (2006) yang melakukan penelitian di kota/kabupaten di Jawa Tengah dengan judul “Analisis Dampak Desantralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah”. Penelitian ini dilakukan secara sensus dengan data sekunder berbentuk time series dari tahun 2001 sampai dengan 2005. Bentuk hubungan sebab akibat yang muncul menggunakan model yang cukup kompleks, yaitu adanya variabel yang berperan ganda sebagai variabel independen pada suatu hubungan, tetapi menjadi variabel dependen pada hubungan yang lain. Bentuk hubungan seperti ini membutuhkan alat analisis yang mampu menjelaskan secara simultan, untuk itu digunakan analisis jalur (*path analysis*). Proses perhitungan koefisien dalam analisis jalur didekati melalui analisis regresi dengan variabel yang dibakukan (*standardise regression*). Dari berbagai uji (uji normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, multikolinearitas) model menunjukkan lolos uji, sehingga model yang dipakai menunjukkan baik. Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Amin Pujiati (2008) yang melakukan penelitian pada Karesidenan Semarang dengan judul “Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal”. Variabel independen yang digunakan yaitu PAD, DAU, DBH dan tenaga kerja (TK), sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu pertumbuhan

ekonomi yang di proksi dengan PDRB. Alat analisis yang digunakan yaitu regresi dengan model data panel menggunakan metode *Generalized Least Squares (GLS)* dengan pendekatan fixed effect. Hasil penelitian diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja (TK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Aan Zulyanto (2010) yang melakukan penelitian di Provinsi Bengkulu dengan judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu”. Analisis desentralisasi fiskal difokuskan pada indikator pengeluaran, yang merupakan rasio total pengeluaran pemerintah daerah terhadap total pengeluaran pemerintah pusat, serta menggunakan satu set variabel kontrol yang terdiri dari Level Awal Pertumbuhan, Pertumbuhan Penduduk, Investasi, dan *Human Capital*. Studi ini menggunakan data panel dan alat analisis Least Square Dummy Variabel (LSDV) atau dikenal juga sebagai Fixed Effect Model (FEM).

Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat bentuk *hump-shaped (a hump-shaped relation)* dalam pengaruh desentralisasi fiskal di provinsi Bengkulu. Artinya pada saat derajat desentralisasi fiskal belum terlampaui tinggi, maka kebijakan desentralisasi fiskal akan membawa pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun pada derajat desentralisasi fiskal terlampaui tinggi, kebijakan desentralisasi fiskal justru akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dengan derajat desentralisasi fiskal tinggi sebaiknya justru lebih berfokus untuk melakukan kebijakan efisiensi dan efektifitas pada anggaran pengeluaran pemerintah karena akan memberikan manfaat yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Joko Waluyo (2007) yang melakukan penelitian pada antar daerah di Indonesia dengan judul “Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Indonesia”. Variabel independen yang digunakan yaitu DAU, DBH (DBHP dan DBHSDA) dan desentralisasi fiskal, sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan. Alat analisis yang digunakan yaitu *Two Stage Least Square* (TSLs). Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berfungsi sebagai pemerataan fiskal daerah juga merupakan faktor yang paling dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, kebijakan DAU sangat efektif untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antar daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) menghasilkan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang negatif dan memperburuk kesenjangan pendapatan antar daerah.

Jr-Tsung Huang dan An-Chih Cheng (2005) yang melakukan penelitian di cina dengan judul “The Role of Fiscal Decentralization in Regional Economic Growth in China”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki peran desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah Cina sejak reformasi fiskal pada tahun 1994. Penelitian ini menggunakan analisis Ordinary Least Square (OLS), yakni metode untuk mengestimasi dua spesifikasi model yaitu satu menggunakan *FDA* dan lainnya mensubstitusi *FDA* dgn *FDB* sebagai pengukuran desentralisasi fiskal. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi regional adalah kurva berbentuk U (*U-Shaped*). Setelah mengendalikan masalah heteroskedasticity, temuan utama dari penelitian adalah bahwa desentralisasi fiskal memiliki hubungan berbentuk U dengan pertumbuhan ekonomi regional, yang berarti kontribusi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi regional di tahap awal desentralisasi fiskal. Namun, efek negatif berkurang bersama

dengan peningkatan desentralisasi fiskal. Setelah melewati tingkat kritis, desentralisasi fiskal akan menguntungkan pertumbuhan ekonomi regional.

Table 2.1 : **Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Penulis	Variable	Analisis
1	ANALISIS DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH	Hadi Sasana (2006)	desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi	Pengujian hipotesis penelitian menggunakan analisis jalur (<i>path analysis</i>), yang dikembangkan sebagai model untuk mempelajari pengaruh secara langsung maupun tidak langsung dari variabel eksogen terhadap variabel endogen
2	ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DI KARESIDENAN SEMARANG ERA DESENTRALISASI FISKAL	Amin Pujiati (2008)	PDRB, PAD, DBH, DAU, Tenaga Kerja	Pengujian hipotesis penelitian menggunakan Generalized Least Squares (GLS), dengan pendekatan fixed effect.
3	PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI BENGKULU	Aan Zulyanto	PDRB riil perkapita, ratio total belanja pemerintah daerah terhadap total belanja pemerintah pusat (desentralisasi fiskal), Pertumbuhan Penduduk, Investasi, <i>Human Capital</i>	Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi berganda (<i>Multiple Regression Analysis</i>), Metode OLS atau dikenal juga sebagai metode common effect atau koefisien tetap antar waktu dan individu, model least squares dummy variable (LSDV) dan model generalized least squares (GLS)

4	DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR DAERAH DI INDONESIA	Joko Waluyo (2007)	Variabel endogen : PDRB, Labour (L), Konsumsi, Investasi, Pengeluaran pemerintah, pajak, retribusi daerah (R), laba perusahaan daerah dan penerimaan daerah lainnya. Variabel eksogen : konsumsi, modal (K), tenaga kerja (L), jumlah penduduk (POP), PDRBcap (PDRB per kapita), PDRB konsumsi	Teknik estimasi yang digunakan adalah <i>two stage least square</i> (<i>TLSS</i>), evaluasi terhadap kualitas model menggunakan RMSE, MAE, MAP dan TIC
5	The Role of Fiscal Decentralization in Regional Economic Growth in China	Jr-Tsung Huang * An-Chih Cheng ** Taiwan	FDA, FDB (desentralisasi fiskal) Pertumbuhan PDB Riil	Metode penelitian yang digunakan adalah model empiris untuk menguji hubungan antara desentralisasi fiskal dan regional pertumbuhan ekonomi dan untuk menyelidiki lebih lanjut hipotesis hubungan non-linear. Ordinary Least Square (OLS): metode untuk mengestimasi dua spesifikasi model: satu menggunakan <i>FDA</i> dan lainnya mensubstitusi <i>FDA</i> dgn <i>FDB</i> sebagai pengukuran desentralisasi fiskal.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang diketahui dalam suatu masalah tertentu. Kerangka pemikiran akan menghubungkan variabel-variabel penelitian, yaitu variabel independen (X) dan variabel dependen (Y).

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari daerah sendiri yang digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah. Semakin tinggi PAD yang diperoleh suatu daerah maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Hal ini bisa terjadi karena dengan penerimaan PAD yang semakin tinggi, daerah semakin bisa memenuhi kebutuhan pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik sehingga produktifitas masyarakat meningkat yang selanjutnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

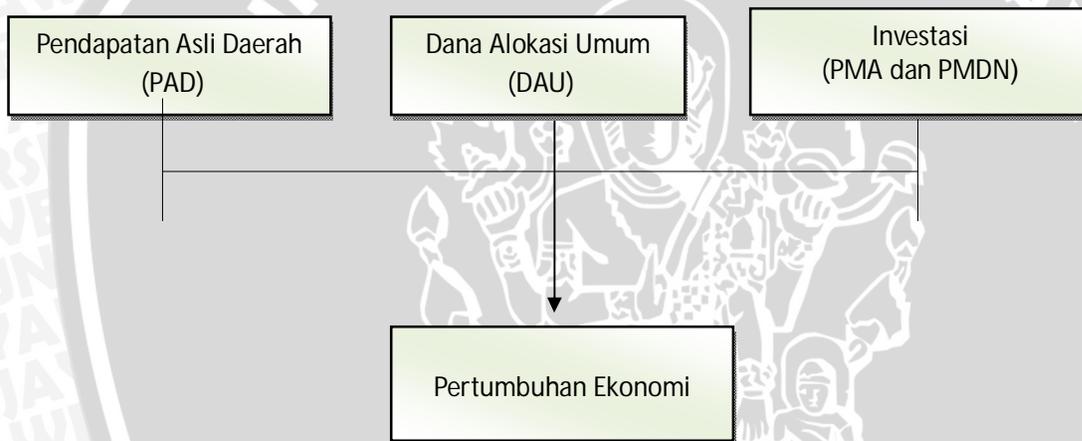
Dana Alokasi Umum adalah dana yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antara daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka desentralisasi. Dengan adanya Dana Alokasi Umum, pembiayaan daerah dalam pembangunan lebih terjamin. Namun Dana Alokasi Umum menyebabkan masih tinggi ketergantungan sebagian besar pemerintah daerah pada dana dari pusat untuk belanja daerah. Kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi.

Investasi merupakan salah satu komponen yang penting dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan merupakan unsur yang paling penting dalam meningkatkan perekonomian. Investasi akan menambah jumlah (stock) dari kapital, tanpa investasi tidak ada ekspansi hal ini sesuai dengan pendapatan Jhingan (2000) menyatakan bahwa peran investasi dalam proses pertumbuhan ekonomi adalah

menciptakan pendapatan dan memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan modal.

Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Investasi serta satu variabel dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi. Dari beberapa landasan teori dan penelitian terdahulu, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.4 : Kerangka Pemikiran



Sumber : penulis

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara yang hendak diuji kebenarannya dengan menggunakan perhitungan empirik dan nilai matematis, dimana hipotesis ini terjadi pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih. Selanjutnya, hipotesis disusun berdasarkan kajian teori dan tinjauan hasil-hasil penelitian yang telah dipaparkan pada sub bab kerangka teori. Di dalam penelitian ini penulis mengemukakan hipotesis :

1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada masa desentralisasi fiskal untuk variabel :
 - Pendapatan Daerah (PAD)
 - Dana Alokasi Umum (DAU)
 - Investasi (PMA dan PMDN)
2. Variabel pendapatan asli daerah (PAD) merupakan variabel yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota/kabupaten Provinsi Jawa Timur pada masa desentralisasi fiskal



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini dilakukan di 38 Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2009.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana pendekatan ini memakai sejumlah data dan juga beberapa variabel yang bersifat mempengaruhi variabel terikat (*dependent variabel*) dan variabel yang bersifat dipengaruhi variabel bebas (*independent variabel*). Dengan jenis penelitian adalah Kuantitatif deskriptif yang bertujuan menjelaskan atau menggambarkan hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

3.3 Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman tentang variabel yang diteliti, perlu penegasan dan penjelasan mengenai definisi operasional variabel. Definisi operasional memberikan pengertian variabel yang disesifikasikan sesuai dengan yang dibutuhkan untuk pengukuran. Dilihat dari sudut pandang hubungannya variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen.

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel dapat di tulis dalam X. Berdasarkan uraian pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, maka penelitian ini menspesifikasikan variabel independen dan definisi operasional sebagai berikut :

1 “X1” (Pendapatan Asli Daerah).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari laba perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi PAD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur

2 “X2” (Dana Alokasi Umum).

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi DAU Kabupaten/kota provinsi Jawa Timur

3 “X3” (Investasi)

Dalam penelitian ini investasi dilihat dari data PMA dan PMDN di Jawa Timur. Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan jumlah investasi asing atau suatu modal yang berasal dari luar negeri yang masuk dalam wilayah suatu negara untuk dikembangkan melalui berbagai kegiatan usaha. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan jumlah investasi domestik atau suatu modal yang berasal dari kekayaan masyarakat setempat atau dalam negeri yang disisihkan guna menjalankan sesuatu usaha.

Variabel dependen merupakan variabel terikat yang mendasari penelitian, variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dapat ditulis dalam Y. Berdasarkan uraian pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, maka penelitian ini menspesifikasikan variabel

dependen dan definisi operasional sebagai “Y” (Pertumbuhan Ekonomi). Data yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2000 menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

3.4 Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan informasi yang telah disusun dan dipublikasikan oleh instansi tertentu. Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data panel (*pooling data*). Data panel merupakan gabungan dari *time series* dan *cross section* (Kuncoro, 2007). Data *time series* berupa tahun 2005-2009, data *cross section* berupa 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Data panel mempunyai beberapa keunggulan antara lain sebagai berikut (Gujarati, 2009) :

1. Data panel mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu. Kemampuan mengontrol heterogenitas individu ini, selanjutnya menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun perilaku yang lebih kompleks.
2. Penggabungan data *time series* dan *cross-section* akan menghasilkan data yang lebih informatif, bervariasi, mengurangi keterkaitan antar variabel dan mempunyai derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang lebih besar serta lebih efisien.
3. Dengan mempelajari observasi *cross-section* secara berulang-ulang (*time series*), data lebih cocok mempelajari perubahan yang dinamik.
4. Data panel dapat menjelaskan dan mendeteksi pengaruh-pengaruh yang tidak bisa dijelaskan dengan menggunakan data *time series* dan *cross-section*.

5. Data panel dapat meminimalisasi bias.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini di peroleh dari beberapa sumber, antara lain :

1. Data PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2009 bersumber dari kantor BPS Provinsi Jawa Timur.
2. Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2009 bersumber dari *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan*
3. Data Investasi (PMA dan PMDN) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2009 bersumber dari Badan Penanaman Modal Prov, Jawa Timur

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh untuk penelitian ini diperoleh dari hasil studi pustaka dan tehnik dokumentasi. Studi pustaka merupakan tehnik analisa untuk mendapatkan informasi melalui catatan, literatur, dan lain-lain yang masih relevan, dan tehnik dokumentasi dilakukan dengan menelusuri dan mendokumentasikan data-data dan informasi yang berkaitan dengan obyek studi.

3.6 Spesifikasi Model

Untuk mengestimasi pengaruh PAD, DAU, dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB di 38 kota dan Kabupaten di Propinsi Jawa Timur digunakan analisis regresi panel yaitu tehnik analisis regresi yang dengan karakteristik data merupakan gabungan *cross-sectional* dan *time series*. Data *cross-section* pada penelitian ini adalah 38 kota dan kabupaten di Jawa Timut. Data *time series* pada

penelitian ini adalah tahun 2005 hingga 2009 sehingga banyaknya observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah 190 unit.

Adapun model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y_t = \alpha_{0i} + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + \varepsilon_t$$

Keterangan:

Y = Pertumbuhan ekonomi (PDRB)

X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X2 = Dana Alokasi Umum (DAU)

X3 = Investasi

α_0 = Konstanta

i = 1, 2, 3, ..., 38

t = 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

ε_{it} = Komponen error dalam model penelitian

β_1 - β_3 = Koefisien parameter

3.7 Pengujian Pemilihan Model Regresi Panel

Untuk mengestimasi model regresi panel pada data PAD, DAU, investasi, serta PDRB pada 38 kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Timur dari tahun 2005 hingga 2009, terlebih dahulu ditentukan metode estimasi yang sesuai.

3.7.1 Uji Chow

Pengujian ini dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya efek individu di dalam model. Pendeteksian ini dilakukan melalui uji Chow dengan hipotesis :

Ho : $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_{38} = \alpha$ (intersep adalah sama yaitu mengikuti model Common Effect)

H_1 :sekurang-kurangnya ada satu intersep (α_{it}) yang tidak sama (mengikuti model fixed effect)

Dengan uji statistik

$$CHOW = \frac{(RSS_1 - RSS_2)/(N - 1)}{(RSS_2)/(NT - N - K)}$$

Dengan

RSS_1 = residual sum of square teknik Model common effect

RSS_2 = residual sum of square teknik Model fixed effect

N = jumlah unit cross section

T = jumlah unit time series

K = jumlah variabel bebas

Jika $F_{hitung} > F_{(N-1, NT-N-K)}$ atau p-value $< \alpha$ maka H_0 ditolak yang berarti model mengikuti fixed effect.

3.7.2 Uji Hausman

Pengujian Hausman dilakukan untuk menentukan ada tidaknya korelasi antara error dan variabel bebas dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : $corr(X_{it}, u_{it}) = 0$ (model Random Effect)

H_1 : $corr(X_{it}, u_{it}) \neq 0$ (model fixed effect)

Dengan uji statistik adalah sebagai berikut

$$W = \chi^2(K) = (\mathbf{b} - \hat{\boldsymbol{\beta}})' [\text{var}(\mathbf{b}) - \text{var}(\hat{\boldsymbol{\beta}})]^{-1} (\mathbf{b} - \hat{\boldsymbol{\beta}})$$

Dengan \mathbf{b} merupakan vector dari estimasi parameter model fixed effect dan $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ merupakan vector dari estimasi parameter model random effect

Kesimpulan tolak H_0 jika $\chi^2_{hitung} > \chi^2_{k,\alpha}$ atau p-value $< \alpha$ yang berarti model mengikuti fixed effect.

3.7.3. Uji Glejser

Uji ini dilakukan untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas pada model *fixed effect*. Jika terbukti terjadi heteroskedastisitas pada model *fixed effect*, maka untuk mengatasinya model *fixed effect* harus diestimasi dengan menggunakan metode *weighted : Cross-section Weights*. Cara melakukan uji Glejser adalah melakukan regresi antara nilai absolute residual (U_t) terhadap variabel bebas dengan persamaan:

$$[U_t] = \alpha + \beta X_t + V_i$$

Jika variabel bebas secara statistik signifikan mempengaruhi variabel terikat (U_t), maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas.

3.8 Uji Asumsi Klasik

3.8.1 Uji Normalitas

Pengujian distribusi data bertujuan untuk pengujian suatu data penelitian apakah dalam model statistik, variabel terikat dan variabel bebas berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Distribusi data normal menggunakan statistik parametrik sebagai alat pengujian. Sedangkan distribusi tidak normal menggunakan statistik non parametrik sebagai alat pengujian. Untuk mengetahui distribusi data suatu penelitian, salah satu alat yang digunakan adalah menggunakan uji *Jarque-Bera (J-B test)*. Apabila nilai J-B lebih kecil dari 2 maka model dapat dikatakan terdistribusi normal, dan jika probabilitas lebih besar dari 5% model dikatakan terdistribusi normal.

3.8.2 Uji Multikolinieritas

Mendeteksi multikolinieritas dalam penelitian menggunakan kriteria jika R^2 besar sedangkan variabel independent tidak ada yang signifikan maka mengindikasikan adanya multikolinieritas. Hal ini juga dikuatkan dengan analisis korelasi *Pearson*. Jika hasil korelasi antar variabel independent sangat besar yaitu lebih dari 0,7 maka mengindikasikan terjadinya multikolinieritas antar variabel penjelas

3.9 Uji Statistik

Selain Uji Asumsi Klasik, juga dilakukan uji statistik yang dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktualnya. Pengujian statistik melibatkan ukuran kesesuaian model yang digunakan (*goodness of fit*) dan uji signifikansi, baik pengujian secara parsial (uji t) maupun pengujian secara simultan (uji F). Secara spesifik, dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.9.1 Koefisien Determinasi

Nilai R² disebut juga koefisien determinasi. Koefisien determinasi (R²) menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependennya (*goodness of fit test*). Nilai R² dapat diperoleh dengan formula sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{\beta_1 \sum y_1 x_1 + \beta_2 \sum y_2 x_2 + \dots + \beta_n \sum y_n x_n}{\sum y^2 n}$$

Nilai berkisar antara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai R² yang kecil atau mendekati nol berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Sebaliknya, jika nilai R² mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Gujarati, 2009).

3.9.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan t hitung terhadap t tabel dengan ketentuan sebagai berikut:

Ho : $\beta = 0$, berarti tidak ada pengaruh positif dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (individu).

Ho : $\beta > 0$, berarti ada pengaruh positif dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (individu).

Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikan 5% ($\alpha = 0,05$) dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

- a. Jika t hitung $>$ t tabel maka H_a diterima dan H_o ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (individu).
- b. Jika t hitung $<$ t tabel maka H_o diterima dan H_a ditolak berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (individu).

3.9.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap variabel dependen. Cara yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dengan ketentuan sebagai berikut:

- $H_o : \beta = 0$, berarti tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-sama).
- $H_o : \beta > 0$, berarti ada hubungan yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-sama).

Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikan 5% ($\alpha = 0,05$) dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

- a. Jika F hitung $>$ F tabel maka H_a diterima dan H_o ditolak berarti ada variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

- b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak berarti variabel independen secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

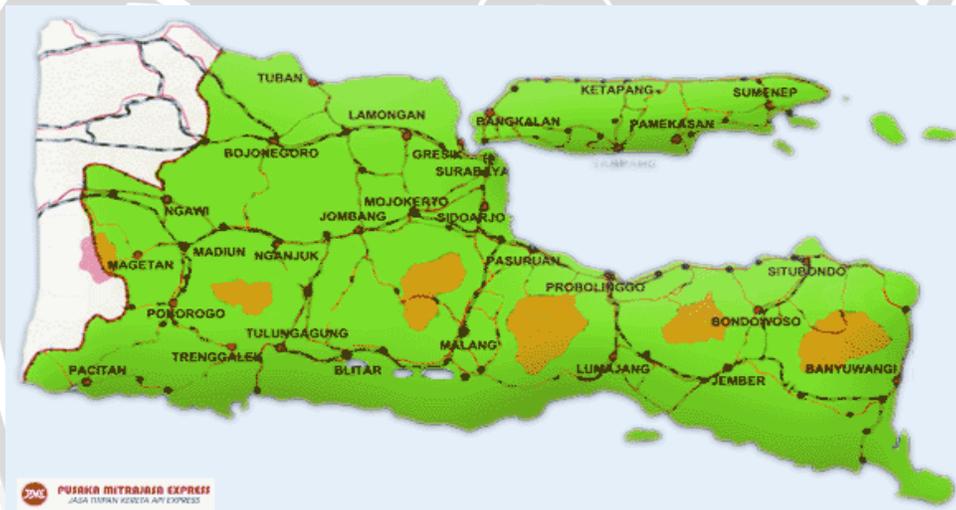
Provinsi Jawa Timur adalah provinsi yang berada di kepulauan Jawa dengan luas wilayah daratan mencapai 47.130,50 Km² dan luas wilayah lautnya mencapai 110.000 Km². Provinsi Jawa Timur berada pada posisi antara 111° dan 114° Bujur Timur dan 7°12" dan 8°48" Lintang Selatan. Sesuai dengan letak geografisnya, di sebelah utara provinsi ini berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan pulau Bali, dan disebelah barat berbatasan dengan provinsi Jawa Tengah. Secara umum, Jawa Timur dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu Jawa Timur daratan dengan proporsi lebih luas hampir mencakup 90 persen dari seluruh luas wilayah Propinsi Jawa Timur dan wilayah Kepulauan Madura yang hanya sekitar 10 persen saja.

Berdasarkan sifat-sifat geografisnya, Jawa Timur dibagi menjadi 4 (empat) wilayah yaitu:

- Wilayah 1 (bagian tengah), meliputi daerah Ngawi sampai dengan Banyuwangi, merupakan daerah yang paling subur yang dialiri oleh Sungai Madiun, Brantas, Konto dan Sungai Sampean.
- Wilayah 2 yang merupakan bagian utara, meliputi daerah-daerah seperti daerah antara Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik dan Pulau Madura yang mempunyai ciri khas gunung-gunung kapur.

- Wilayah 3 yang merupakan bagian selatan, yakni terdapat pantai selatan yang terbentang dari Pacitan sampai Jember, yang merupakan daerah kritis dan kurang subur.
- Wilayah 4 yang terbentuk oleh 105 pulau dengan pulau terbesar yaitu Pulau Bawean di Kabupaten Gresik, Sampang, Sumenep dan Probolinggo. Sedangkan Kabupaten Sumenep memiliki 102 pulau besar dan kecil, baik yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni.

Gambar 4.1 : Peta Administratif Provinsi Jawa Timur



Secara administratif, Jawa Timur terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) Kabupaten dan 9 (sembilan) Kota dengan 632 kecamatan dan 8.459 desa/ Kelurahan. Hal tersebut menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia, dengan Surabaya sebagai ibukota provinsi. Jumlah penduduk provinsi Jawa Timur sebanyak 37.070.731 jiwa dengan kepadatan penduduk 794 perkilometer persegi (menurut data BPS Provinsi Jawa Timur tahun 2005). Kota Surabaya sebagai ibu kota provinsi Jawa Timur memberikan kontribusi besar dalam menggerakkan roda pembangunan ekonomi di Jawa Timur.

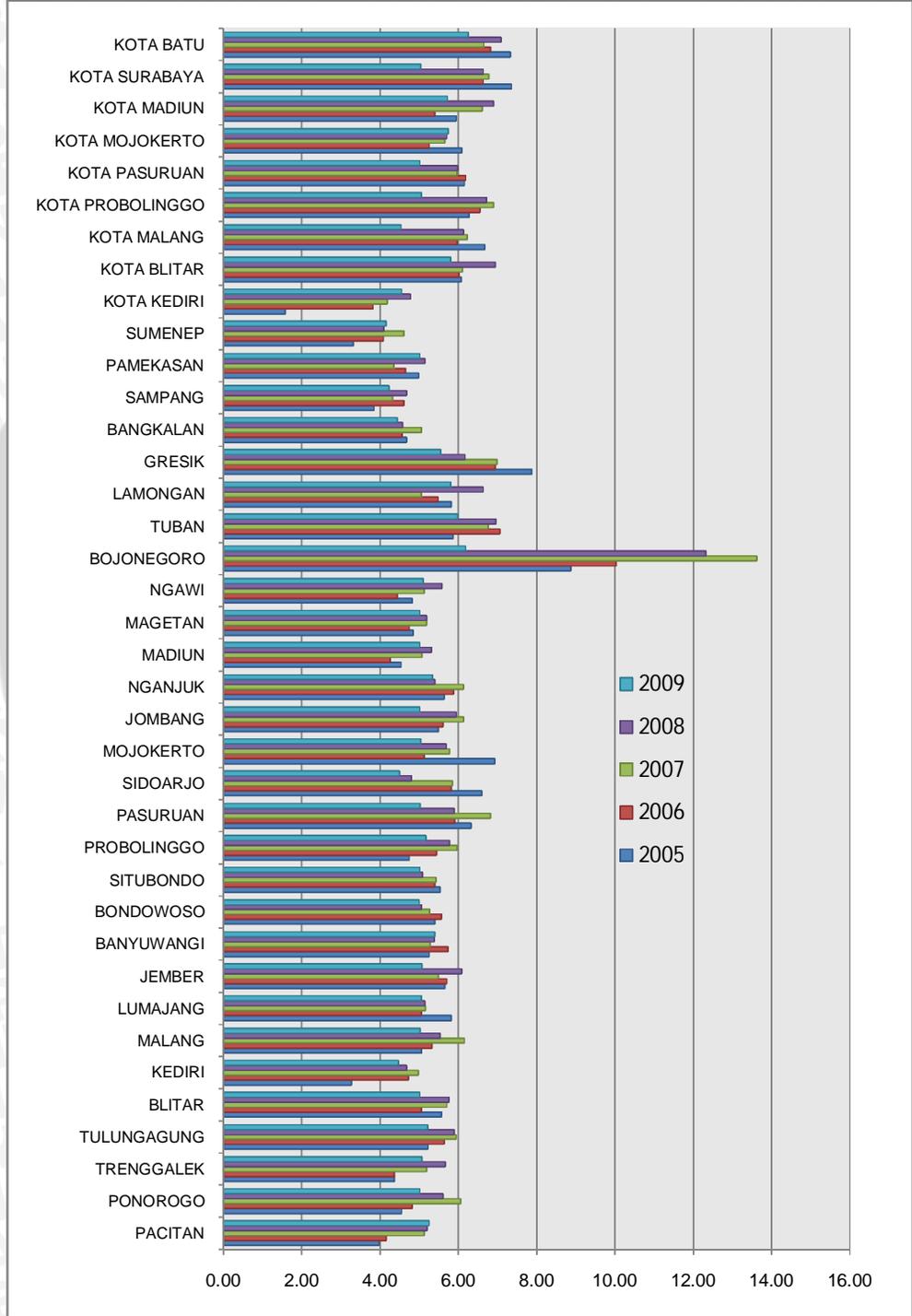
4.2 Deskripsi Variabel Penelitian

4.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Untuk melihat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dapat dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan 2000, karena pertumbuhan ekonomi ini benar-benar diakibatkan dari perubahan jumlah nilai produksi sektoral yang sudah bebas dari pengaruh harga (pertumbuhan riil). Dari PDRB atas dasar harga konstan 2000 tercatat bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selama periode 2005-2009 berturut-turut sebesar 5,84 persen (2005); 5,80 persen (2006); 6,11 persen (2007); 5,90 persen (2008) dan 5,01 (2009) . Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2006 hanya sebesar 5,80 persen akibat dari efek *multiplier* kenaikan BBM pada tahun sebelumnya, dan juga diakibatkan oleh naiknya cukai rokok.

Pada tahun 2007, pertumbuhan ekonomi kembali menggeliat, hingga mampu tumbuh 6,11 persen. Tetapi kondisi itu tidak bertahan lama, karena pada akhir tahun 2007 hingga kuartal kedua tahun 2008 harga minyak dunia meningkat. Secara perlahan, kenaikan itu juga berdampak pada kenaikan BBM di dalam negeri yang pada akhirnya mendorong pergerakan harga barang dan jasa ikut menjadi naik. Kondisi ini terus berlanjut dengan terjadinya krisis finansial yang dimulai dari kasus *subprime mortgage* di Amerika Serikat, hingga meluas di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Bagai efek domino, Jawa Timur juga terkena imbas, sehingga pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 melambat kembali hanya mencapai 5,90 persen. Dan pada tahun 2009 menjadi lebih menurun jauh hingga mencapai 5,01.

Gambar 4.2 : Pertumbuhan Ekonomi di Tiap Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2005-2009 (pesen)



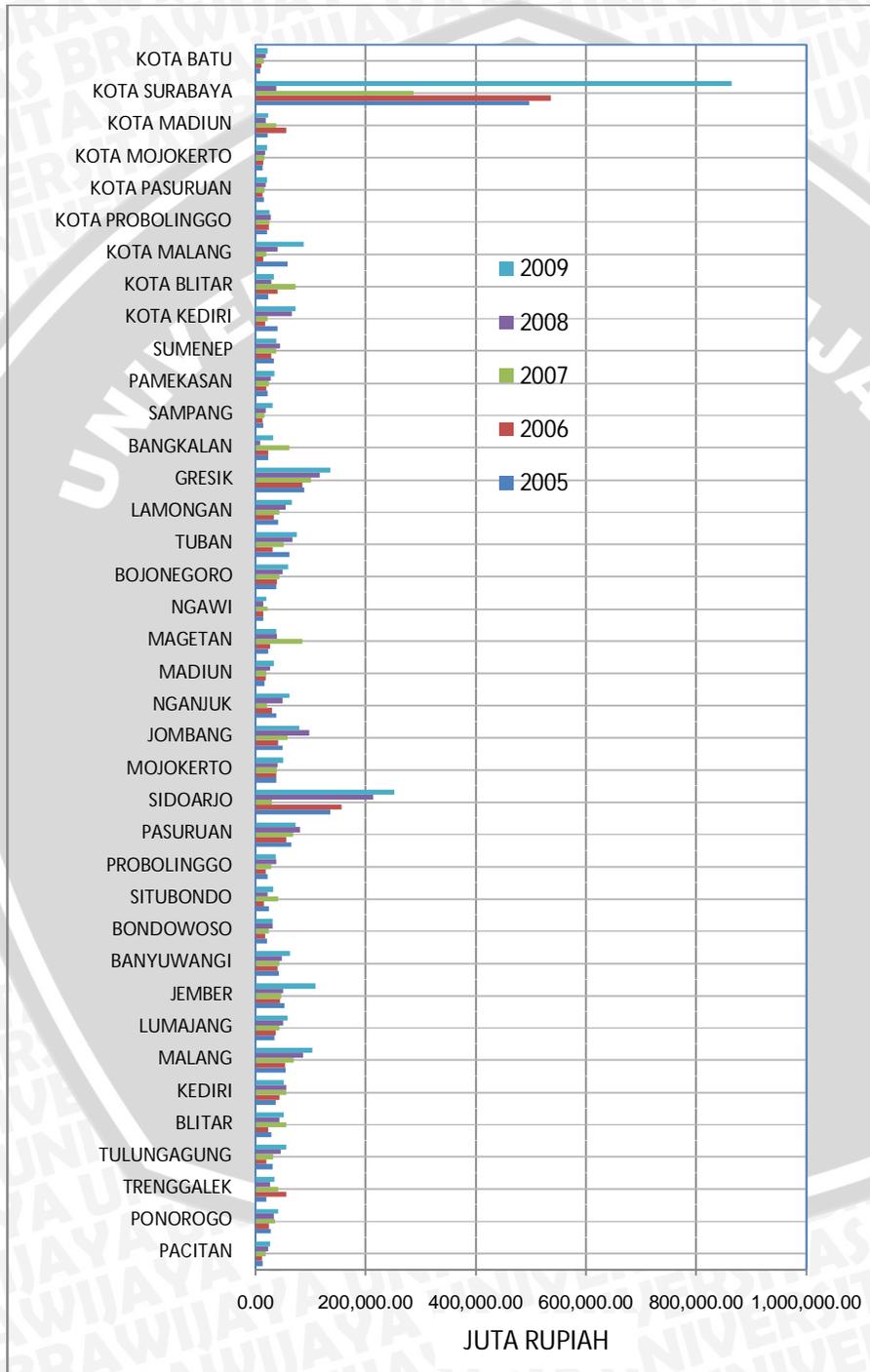
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2005-2009), diolah

Terlihat dalam gambar bahwa salah satu kabupaten/kota penyumbang pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jawa Timur adalah Kabupaten Bojonegoro, berturut-turut sebesar 10,03 persen pada tahun 2006; 13,62 persen pada tahun 2007; dan 12,32 persen pada tahun 2008. Pencapaian yang tinggi ini disebabkan karena Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi sumber daya alam yang cukup baik, terutama di bidang pertambangan. Sebaliknya, ada beberapa kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi terendah dari tahun 2006-2008. Kota Kediri pada tahun 2006 hanya menyumbang sebesar 3,82 persen untuk pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan tahun 2007 tetap menduduki posisi terbawah dengan hanya menyumbang sebesar 4,18 persen. Sedangkan pada tahun 2008, posisi terendah beralih ke Kabupaten Sumenep dengan menyumbang sebesar 4,07 persen.

4.2.2 Gambaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah menggambarkan kemampuan daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber penghasilan dari daerahnya sendiri. Hampir semua PAD di propinsi Jawa Timur didominasi oleh pajak daerah dan retribusi daerah. Pada gambar 4.2.2 terlihat hanya kota Surabaya yang memiliki nilai PAD paling tinggi mencapai lebih dari 800 miliar rupiah. Sementara daerah-daerah yang lain bisa dikatakan relatif sama dan berkisar antara 40 sampai 100 miliar rupiah. Gambar 4.2.2 menggambarkan PAD tiap-tiap daerah pada rentang waktu tahun 2005-2009.

Gambar 4.3 :Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota/ kabupaten Jawa Timur tahun 2005-2009 (juta rupiah)



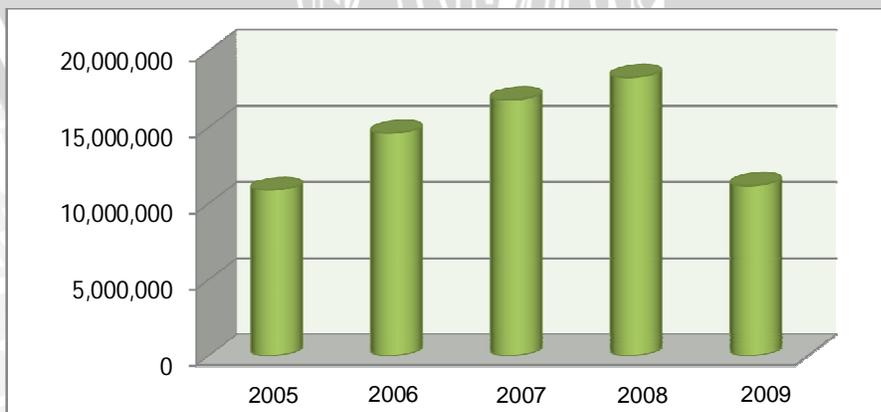
Sumber : DJPK, 2010 (data diola)

Dengan demikian daerah kota lebih berpotensi untuk mengoptimalkan sumber-sumber daya keuangan daerah untuk memajukan perekonomiannya. Namun demikian, PAD yang besar belum tentu menunjukkan daerah tersebut maju secara ekonomi. Dilihat dulu bagaimana pengoptimalan PAD yang terutama melalui pemungutan pajak dan retribusi tidak membebani masyarakat, dan bagaimana pengelolaan dana PAD digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

4.2.3 Gambaran Dana Alokasi Khusus (DAU)

DAU dalam memiliki porsi cukup besar sebagai sumber penerimaan daerah. DAU adalah dana transfer yang digunakan sebagai instrumen pemerataan kemampuan fiskal antar daerah. Ketimpangan antar daerah yang cukup besar menyebabkan DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat juga besar. Dalam komponen penerimaan daerah, DAU merupakan komponen dengan porsi yang terbesar. Gambar 4.2.3 total dana alokasi umum (DAU) di Provinsi Jawa Timur pada kurun waktu 2005-2009.

Gambar 4.4 : Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Jawa Timur pada kurun waktu tahun 2005-2009 (juta rupiah)



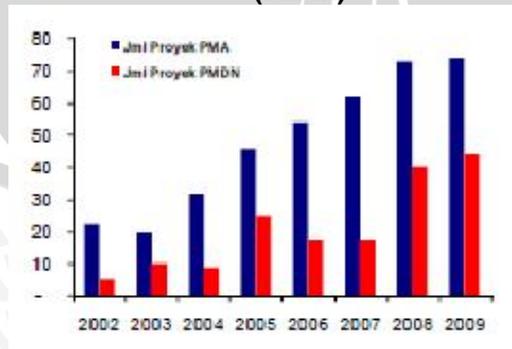
Sumber : DJPK, 2010 (data diolah)

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa proporsi DAU untuk keseluruhan Provinsi Jawa Timur masih cukup tinggi yaitu 10.887.158 (juta rupiah) pada tahun 2005, 14.623.491 (2006), 16.821.024 (2007), 18.293,450 (2008) dan 11.184.780 pada tahun 2009. Pada tahun 2009 angka DAU menurun karena pendapatan asli daerah (PAD) pada waktu itu mengalami kenaikan. Ini sesuai dengan teori dimana proporsi DAU dengan PAD berbanding terbalik yang mengatakan bahwa ketika PAD naik maka DAU akan menurun dan demikian sebaliknya. Secara keseluruhan menunjukkan bahwa masih besar ketergantungan Jawa Timur terhadap pemerintah pusat dalam membiayai kebutuhan daerahnya.

4.2.4 Investasi

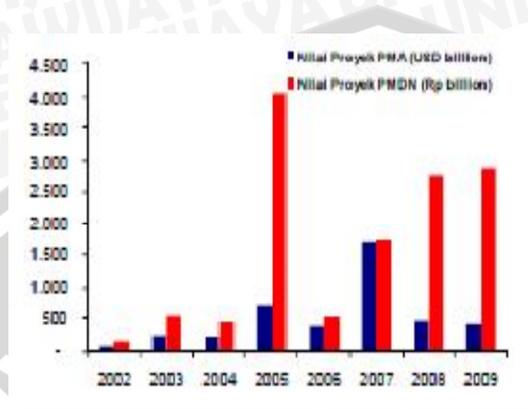
Investasi merupakan pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Dari data yang di peroleh terlihat perkembangan investasi di Jawa Timur sampai pada tahun 2009, dilihat dari perkembangan jumlah proyek investasi maupun nilai investasi.

Gambar 4.5 : **Perkembangan Jumlah Proyek Investasi (tahun)**



Sumber: Bank Indonesia, 2010

Gambar 4.6 :Perkembangan Nilai Proyek Investasi (tahun)



Sumber: Bank Indonesia, 2010

Untuk keseluruhan tahun 2009, investasi PMA maupun PMDN di Jawa Timur masih cukup menggembirakan. Tercatat sejumlah 74 proyek PMA dan 44 proyek PMDN direalisasikan di Jawa Timur pada tahun 2009. Angka ini sedikit lebih tinggi daripada capaian tahun 2008. Nilai proyek yang direalisasikan pun lebih tinggi. Mengingat perekonomian tahun 2009 diwarnai oleh krisis global, maka pencapaian ini menunjukkan tingginya minat dan keyakinan investor akan peluang usaha di Jawa Timur. Dalam kondisi krisis sekalipun investasi di Jawa Timur tidak surut.

Provinsi Jatim memang dipandang memiliki banyak keunggulan dibandingkan daerah lain di Indonesia terutama dari aspek infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandar udara, dan kawasan industri (industrial estate). Selain itu, Provinsi Jatim juga masih memiliki banyak potensi investasi yang belum dikembangkan, seperti sektor pertanian dan pertambangan.

Khusus untuk PMDN, lokasi investasi di Jawa Timur didominasi oleh Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan. Kedua wilayah ini memang sudah mapan sebagai daerah tujuan investasi, khususnya industri manufaktur berskala besar. Di Kabupaten Pasuruan bahkan terdapat kawasan khusus industri (*Pasuruan Industrial Estate*

Rembang), yang memberi fasilitas lengkap dan layanan terpadu bagi industri manufaktur. Dari sisi sektor usaha, investasi PMDN di Jawa Timur paling banyak terealisasi di industri makanan dan industry kimia, sesuai dengan karakteristik industri di Jawa Timur yang didominasi oleh industri makanan dan kimia. Kedua sektor ini memberi kontribusi nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja yang paling banyak dibanding sektor-sektor lain.

4.3 Analisis dan Pembahasan Uji Statistik

Pada bagian subbab ini, peneliti akan menganalisa hasil pengujian statistik akan hubungan antar variabel yang ada dalam penelitian, dengan variabel *independent* diantaranya yaitu PAD, DAU, dan Investasi (PMA dan PMDN) terhadap variabel *dependent* yaitu Pertumbuhan Ekonomi . Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah memakai regresi panel data. Tetapi sebelum menentukan untuk menggunakan metode panel data terlebih dahulu, dilakukan Uji chow yang digunakan untuk mengetahui apakah model *common effect* ataupun *fixed effect* yang akan dipilih untuk pendugaan. Kemudian Uji Hausman, untuk menentukan metode apakah yang paling tepat untuk menguji model, apakah memakai metode efek tetap (MET) ataupun memakai metode efek random (MER), langkah selanjutnya dilakukan uji Asumsi klasik dan juga. Uji-signifikansi (Uji-t dan Uji F)

4.3.1 Model Regresi Panel

Untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU, investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di kota/ kabupaten di Provinsi Jawa Timur pada era desentralisasi fiskal digunakan analisis regresi panel. Analisis ini digunakan karena data diukur pada dimensi *crosssection* yaitu kabupaten/ kota di Jawa Timur yang terdiri dari 38 kabupaten dan kota dan dimensi waktu yaitu selama lima tahun yaitu tahun 2005 hingga 2009.

Model yang akan digunakan untuk melihat pengaruh PAD, DAU, dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB adalah

$$PDRB_t = \alpha_0 + \beta_1 PAD_t + \beta_2 DAU_t + \beta_3 Investasi_t + \varepsilon_t$$

Terdapat 3 metode pendekatan yang digunakan untuk pendugaan regresi panel. Metode pertama adalah common effect yaitu metode yang mengasumsikan bahwa nilai intersep masing-masing unit *cross-section* adalah sama, begitu juga *slope* koefisien untuk semua unit *cross-section* dan *time series*. Metode kedua disebut metode fixed effect yang mengasumsikan nilai intersep berbeda-beda untuk setiap unit *cross-section* tetapi masih mengasumsikan *slope* koefisien tetap. Metode yang ketiga adalah model *random effect* yang memiliki perbedaan pada *error* unit *cross-section* bukan *intercept* seperti pada fixed effect. Untuk memilih model regresi panel dengan pendekatan mana yang digunakan maka dilakukan uji sebagai berikut:

4.3.2 Pemilihan Model Regresi Panel

1. Hasil Uji Chow

Uji chow digunakan untuk mengetahui apakah model *common effect* ataupun *fixed effect* yang akan dipilih untuk pendugaan. Hasil uji chow adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 : Hasil Uji Chow

uji efek	Statistic	db	p-value
<i>cross-section</i> F	135,09278	37;149	0,000

Sumber : data diolah

Nilai signifikansi dari uji F sebesar 0,000 sehingga H_0 ditolak yang artinya sekurang-kurangnya terdapat satu intersep pada unit *cross-section* yang tidak sama sehingga model yang cocok digunakan adalah model *fixed effect*.

2. Hasil Uji Hausman

Terkadang dengan sekumpulan data panel yang telah dimiliki akan menimbulkan sebuah pertanyaan tentang pembuatan model apakah yang nantinya akan cocok bila digunakan untuk data yang telah tersedia, apakah akan menggunakan MET atau MER. Menurut Nachrowi, penentuan penggunaan MET atau MER dapat ditentukan dengan cara matematis sebagai berikut:

- Jika panel data yang dimiliki mempunyai jumlah waktu (T) lebih besar dibanding jumlah individu (N), maka disarankan untuk menggunakan MET.
- Jika panel data yang dimiliki mempunyai jumlah waktu (T) lebih kecil dibanding jumlah individu (N), maka disarankan untuk menggunakan MER. Namun untuk lebih memastikan dengan lebih baik, maka rekomendasi terbaik adalah dengan menggunakan Uji Hausman dalam penentuan penggunaan MET maupun MER.

Uji Hausman merupakan suatu test yang digunakan untuk melihat konsistensi OLS yang telah di duga dengan melakukan bentuk kuadrat dan selisih antara estimator yang konsisten dengan estimator yang efisien. Dalam analisis model panel data yang menggunakan efek acak akan diperoleh estimator yang efisien, sedangkan dalam model analisis panel data yang memakai efek tetap akan diperoleh estimator yang konsisiten.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, peneliti ingin mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat di Kabupaten/kota di Jawa timur.

Daerah yang menjadi kajian penelitian adalah pada 38 Kota/kabupaten di Jawa Timur

sedangkan data yang tersedia memiliki jumlah waktu sebanyak lima tahun, yaitu antara periode waktu tahun 2005 sampai tahun 2009. Sesuai dengan pernyataan Nachrowi dimana panel data yang dimiliki mempunyai jumlah waktu (T) lebih kecil dibanding jumlah individu (N), maka disarankan melakukan Uji Hausman dalam penentuan penggunaan MET maupun MER. Setelah dilakukan pengujian maka di dapat hasil uji Hausman adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 : Hasil Uji Hausman

uji efek	Statistic <i>chi square</i>	Db	p-value
<i>cross-section random</i>	205,590566	3	0.0000

Sumber : data diolah

Dari hasil uji Hausman didapatkan nilai signifikansi lebih kecil dari alpha 0,000 sehingga menunjukkan tidak ada korelasi antara variabel-variabel X_{it} dengan error U_{it} jadi metode pendugaan yang sesuai adalah *metode fixed effect*.

3. Pengujian Asumsi Heterokedastisitas Model Fixed Effect

Asumsi yang harus dipenuhi pada model fixed effect adalah harus tidak ada heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas yang digunakan pada penelitian ini adalah uji Glejser yaitu cara pengujiannya dengan meregresikan absolute residual hasil regresi dengan variabel independent. Keputusan ujinya adalah apabila terdapat variabel independent yang berpengaruh signifikan terhadap *absolute residual* maka dikatakan bahwa terjadi heterokedastisitas pada model regresi. Hasil uji Glejser yang didapatkan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3 : Hasil Uji Glejser

Variabel	Koefisien	T hitung	p-value
Konstanta	358558	4113361	0.0001
PAD	2.857048	8.501126	0,0000
DAU	-0.514827	-2.658984	0.0085
INVESTASI	0.020897	1.191360	0.2350

Sumber : data diolah

Dari hasil regresi di atas didapatkan bahwa variabel PAD berpengaruh terhadap absolute residual sehingga mengindikasikan terjadi heterokedastisitas. Cara mengatasi adanya heterokedastisitas adalah dengan melakukan pendugaan menggunakan metode *weighted:cross-section weight*. Hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut:

4.3.3 Estimasi Model Regresi Panel

1. Pembentukan Model

Berdasarkan pengujian pemilihan model regresi panel yang telah dilakukan, diperoleh bahwa model regresi panel yang sesuai untuk data pertumbuhan ekonomi 38 kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2005 hingga 2009 adalah model fixed effect dengan *cross-section weight* yaitu:

$$\hat{y}_{it} = \hat{a}_{01} + 24.17459X_{1it} + 1.124185X_{2it} + 0,029049X_{3it}$$

Interpretasi dari model regresi panel fixed effect dengan *cross-section weight* di atas adalah jika variabel DAU dan investasi dianggap konstan, penambahan 1 juta rupiah PAD akan menyebabkan PDRB naik sebesar 1.12 juta rupiah. Penambahan 1 juta rupiah DAU akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,029 juta rupiah jika variabel PAD dan investasi dianggap konstan. Penambahan 1 juta rupiah variabel

investasi akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,029 juta rupiah dengan menganggap variabel PAD dan DAU konstan. Estimasi intersep $\hat{\alpha}_{01}$ masing-masing kabupaten/kota untuk *Fixed Effect Model Cross-section Weight* ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.4 : Estimasi Intersep $\hat{\alpha}_{01}$ pada *Fixed Effect Model Cross-Section Weigh*

Kota/kabupaten	Efek	Kota/kabupaten	Efek
Kab. Bangkalan	-3448153	Kab. Pasuruan	-1663197
Kab. Banyuwangi	2132560.	Kab. Ponorogo	-3730707
Kab. Blitar	-1922642	Kab. Probolinggo	-665788
Kab. Bojonegoro	-361487	Kab. Sampang	-3890406
Kab. Bondowoso	-4380773	Kab. Sidoarjo	12713272
Kab. Gresik	5075076.	Kab. Situbondo	-3280342
Kab. Jember	1387695.	Kab. Sumenep	-1914412
Kab. Jombang	-1896271	Kab. Trenggalek	-4656451
Kab. Kediri	-1414330	Kab. Tuban	-1527546
Kab. Lamongan	-2786690	Kab. Tulungagung	-169268
Kab. Lumajang	-1559268	Kota Blitar	-5936116
Kab. Madiun	-3949538	Kota Kediri	13786896
Kab. Magetan	-3724649	Kota Madiun	-5314565

Kab. Malang	4175935.	Kota Malang	4426212
Kab. Mojokerto	-1653107	Kota Mojokerto	-828184
Kab. Nganjuk	-2614006	Kota Pasuruan	-4999696
Kab. Ngawi	-3590299	Kota Probolinggo	-4498335
Kab. Pacitan	-4861551	Kota Surabaya	46864492
Kab. Pamekasan	-4561093	Kota Batu	-4763269

Kota/kabupaten yang memiliki intersep positif antara lain adalah Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember, Kabupaten Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kota Malang, Kota Kediri, dan Kota Surabaya. Sedangkan kota dan kabupaten yang lain memiliki intersep negatif. Intersep dapat diinterpretasikan sebagai pertumbuhan ekonomi akan bernilai intersep jika variabel PAD, DAU, dan investasi bernilai 0. Kota dan Kabupaten yang memiliki intersep positif menandakan jika PAD, DAU dan investasi bernilai 0 maka pertumbuhan ekonomi pada kota dan kabupaten tersebut masih bernilai positif atau masih terdapat pertumbuhan ekonomi pada kota dan kabupaten tersebut. Sedangkan kota dan kabupaten yang memiliki intersep negatif menunjukkan jika PAD, DAU, dan investasi bernilai 0 maka pertumbuhan ekonomi akan memiliki nilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan investasi sangat berpengaruh menaikkan pertumbuhan ekonomi pada kota dan kabupaten yang memiliki intersep negative

2. Evaluasi Model Regresi Panel

Evaluasi model regresi panel merupakan pengujian asumsi model regresi panel yang terbentuk. Model regresi panel yang digunakan pada penelitian ini adalah model *fixed effect* dengan *cross-section weight*. Model *fixed effect* dengan *cross-section weight* tidak perlu diuji asumsi autokorelasi dan sudah memenuhi asumsi heterokedastisitas sehingga pengujian asumsi yang harus dilakukan adalah asumsi normalitas dan multikolinieritas. Hasil asumsi normalitas menggunakan statistic uji Jacque Bera adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 : Hasil Uji Normalitas

Jacque Bera	P-value
2.446921	0.294210

Dari hasil uji normalitas didapatkan nilai p-value lebih dari α 0,05 sehingga residual hasil regresi panel dengan metode *fixed-effect cross-section weight* memenuhi asumsi normalitas.. Hasil uji multikolinieritas menggunakan korelasi *Pearson* adalah sebagai berikut

Tabel 4.6 : Hasil Uji Multikolinieritas Menggunakan Analisis Korelasi

		PAD	DAU	investasi
PAD	Pearson Correlation	1	.184*	.144*
	Sig. (2-tailed)		.011	.047
	N	190	190	190
DAU	Pearson Correlation	.184*	1	.199**
	Sig. (2-tailed)	.011		.006
	N	190	190	190
investasi	Pearson Correlation	.144*	.199**	1
	Sig. (2-tailed)	.047	.006	
	N	190	190	190

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : data diolah

Berdasarkan nilai korelasi antar variabel PAD, DAU dan investasi didapatkan bahwa korelasi yang terbentuk kecil yaitu antara 0 hingga 2 sehingga variabel penjelas tidak terindikasi adanya multikolinieritas atau multikolinieritas pada variabel penjelas terpenuhi.

3. Hasil Uji Parsial

Uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara individu variabel PAD, DAU, dan investasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Uji parsial menggunakan uji statistic t. Hasil uji parsial adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 : Hasil Uji Parsial

Variabel	koefisien	T hitung	p-value
konstanta	5295093	69.77683	0,0000
PAD	24.17459	13.74531	0.0000
DAU	1.124185	8.139114	0.0000
INVESTASI	0.029049	2.062142	0.0409

Sumber : data diolah

Berdasarkan Tabel tersebut dapat diketahui bahwa semua variabel penjelas berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur oleh PDRB. Kesimpulan ini didapatkan karena nilai p-value lebih kecil dari tingkat kesalahan alpha 0,05 sehingga H_0 ditolak.

4. Hasil Uji Simultan

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel tak bebas. Statistik uji yang digunakan untuk uji simultan ini adalah statistic uji F. Hasil uji simultan

untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU, dan investasi secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 : Hasil Uji Simultan

F-statistic	P-value
1002.239	0.0000

Sumber : data diolah

Berdasarkan tabel di atas didapatkan nilai p -value kurang dari alpha 0,05 sehingga H_0 ditolak yang berarti secara bersama-sama atau simultan, variabel PAD, DAU, dan investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

5. Hasil Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana besar keragaman variabel tak bebas dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Koefisien determinasi dilihat dari nilai R^2 . Nilai R^2 yang didapatkan dari memodelkan regresi panel dengan metode fixed effect cross-section weight pada penelitian ini adalah sebesar 0,9963 Hal ini menunjukkan bahwa keragaman pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh PAD, DAU, dan investasi sebesar 99.63%.

6. Hasil Uji Kausalitas Granger

Uji ini digunakan apakah dua variabel saling berpengaruh (berhubungan 2 arah) ataukah 1 arah saja. Hasil uji kausalitas Granger adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9 : Hasil Uji Kausalitas Granger Pertumbuhan Ekonomi dan PAD

H_0	F-hitung	p-value
PDRB does not Granger Cause PAD	6.29266	0.0026
PAD does not Granger Cause PDRB	0.46034	0.6323

Sumber : data diolah

Hipotesis pertama pada tabel di atas menunjukkan apakah PAD mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan hipotesis kedua menunjukkan apakah pertumbuhan ekonomi mempengaruhi PAD. Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut didapatkan bahwa hipotesis pertama menolak H_0 yang berarti pertumbuhan ekonomi dipengaruhi PAD atau PAD mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tidak berlaku sebaliknya sehingga hubungan yang terbentuk adalah hubungan searah.

Uji kausalitas Granger selanjutnya adalah untuk mengetahui apakah DAU dengan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang searah ataukah 2 arah. Hasil uji adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10 : Hasil Uji Kausalitas Granger Pertumbuhan Ekonomi dan DAU

Ho	F-hitung	p-value
PDRB does not Granger Cause DAU_BELANJA	0.62309	0.5382
DAU_BELANJA does not Granger Cause PDRB	1.09002	0.3398

Sumber : data diolah

Hipotesis pertama pada tabel di atas menunjukkan apakah DAU mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan hipotesis kedua menunjukkan apakah pertumbuhan ekonomi mempengaruhi DAU. Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut didapatkan bahwa hipotesis pertama maupun kedua menerima H_0 yang berarti secara uji kausalitas pertumbuhan ekonomi tidak dipengaruhi DAU atau DAU tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan begitupun sebaliknya sehingga dikatakan tidak terjadi hubungan pertumbuhan ekonomi dengan DAU searah maupun 2 arah. Hal ini tidak sesuai dengan hasil regresi panel yang menunjukkan DAU berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Tabel berikut menunjukkan hasil uji kausalitas granger untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4.11 :Hasil Uji Kausalitas Granger Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi

Ho	F-hitung	p-value
PDRB does not Granger Cause INVESTASI_1	0.62309	0.5832
INVESTASI_1 does not Granger Cause PDRB	1.09002	0.3398

Sumber : data diolah

Hipotesis pertama pada tabel di atas menunjukkan apakah investasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan hipotesis kedua menunjukkan apakah pertumbuhan ekonomi mempengaruhi investasi. Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut didapatkan bahwa hipotesis pertama dan kedua sama-sama menolak H_0 yang berarti tidak ada hubungan saling mempengaruhi antar pertumbuhan ekonomi dengan investasi. Sama halnya dengan uji kausalitas yang terjadi antara pertumbuhan ekonomi dan DAU, uji kausalitas pada investasi dan pertumbuhan ekonomi juga mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan hasil regresi panel dengan metode *weighted fixed effect*. Hasil regresi panel sudah memperhitungkan unsur cross sectional maupun *time series* yang ada dalam data. Selain itu model *weighted fixed effect* untuk regresi panel ini juga telah mampu menangani adanya pelanggaran asumsi heterokedastisitas sehingga uji kausalitas saja tidak cukup bisa digunakan untuk menyimpulkan hubungan PAD dan investasi dengan pertumbuhan ekonomi.

4.4 Pembahasan Ekonomi

4.4.1 Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dalam struktur keuangan daerah, pendapatan asli daerah (PAD) dipandang sebagai kemampuan riil keuangan daerah. PAD diperoleh dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain PAD yang sah. Penerapan desentralisasi fiskal oleh pemerintah pusat Indonesia memiliki tujuan untuk kemandirian pemerintah daerah dalam

pengelolaan rumah tangganya. Pemerintah daerah harus dapat menjalankan rumah tangganya secara mandiri dan dalam upaya peningkatan kemandirian ini, pemerintah dituntut untuk meningkatkan pelayanan publiknya. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas di berbagai sektor, produktifitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Dari hasil analisis yang dilakukan di kota/kabupaten Provinsi Jawa Timur terdapat hubungan yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang artinya bahwa pendapatan asli daerah (PAD) merupakan faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uji statistik yang telah dilakukan dapat diartikan apabila PAD ditambah, maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang juga merupakan modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) juga merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat (Widjaja, 1992).

Hasil penelitian pada kota/kabupaten di Jawa Timur ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amin Pujianti (2008) bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tanda positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan PAD merupakan eksese dari pertumbuhan ekonomi. Sependapat dengan ini Bappenas (2003) menegaskan bahwa pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap kenaikan PDRB, artinya setiap terjadi kenaikan PDRB akan memberikan dampak positif terhadap kenaikan PAD. Selain itu dengan tingginya PAD maka menunjukkan bahwa daerah itu mempunyai sedikit ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Seperti yang di kemukakan dalam penelitian Silitonga (2009) bahwa

kemandirian daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain. Semakin tinggi tingkat rasio kemandirian, maka dapat diartikan semakin rendah ketergantungan bantuan terhadap pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama dalam PAD. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi yang nantinya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

4.4.2 Hubungan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal yang dilakukan, setiap daerah mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Beberapa daerah yang memiliki sumber daya mampu menyelenggarakan otonomi daerah, namun tidak tertutup kemungkinan ada beberapa daerah yang menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi, mengingat ketergantungan sumber daya yang dimiliki (Bappenas, 2003). Dalam penerapannya pemerintah pusat tidak lepas tangan secara penuh dan masih memberikan bantuan kepada pemerintah daerah berupa dana perimbangan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan dan menjadi menjadi komponen pendapatan daerah dalam APBD.

Dari hasil uji yang telah dilakukan dengan regresi data panel yang dilakukan di kota/kabupaten Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa realisasi dana alokasi umum (DAU) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini dana alokasi umum (DAU) termasuk dalam variabel bebas yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jadi dapat dikatakan setiap terjadi kenaikan dana alokasi umum (DAU) maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hasil dari penelitian ini

mendukung temuan dari Joko Waluyo (2007) bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berfungsi sebagai pemerataan fiskal daerah juga merupakan faktor yang paling dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, kebijakan DAU sangat efektif untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antar daerah.

Dana alokasi umum (DAU) itu sendiri dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil Brodjonegoro (2002) dalam Nurjanna (2008). Selain itu DAU juga untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sehingga nantinya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

4.4.3 Hubungan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada kota/kabupaten provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa investasi (PMA dan PMDN) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil estimasi menunjukkan bahwa dengan meningkatnya investasi maka akan semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mudrajad (2005), dimana dalam jangka panjang investasi akan meningkatkan potensi output dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara terus-menerus baik melalui penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA).

Menurut Tambunan (2001), investasi merupakan suatu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi (*sustainable development*) atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pembangunan ekonomi melibatkan kegiatan-kegiatan produksi (barang dan jasa) di semua sektor-sektor ekonomi.

Dengan adanya kegiatan produksi, maka terciptalah kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat, yang selanjutnya meningkatkan permintaan di pasar. Pasar berkembang dan berarti juga volume kegiatan produksi, kesempatan kerja dan pendapatan dalam negeri meningkat dan seterusnya, maka terciptalah pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian yang dilakukan di kota/kabupaten di Jawa Timur ini juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Aan Zulyanto (2010) bahwa Investasi menunjukkan arah hubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya penambahan rasio investasi per PDRB akan mendorong pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu.

Dalam pembangunan daerah diperlukan berbagai fasilitas modal. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan penerimaan daerah. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas ini akan berujung pada peningkatan kemandirian daerah.

Menurut Suryaningrum (2000), Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dapat dibedakan dalam tiga hal, yaitu : (1) pertumbuhan yang disebabkan oleh modal, (2) pertumbuhan yang disebabkan oleh tenaga kerja, dan (3) pertumbuhan yang disebabkan oleh perubahan dalam produktivitas (Suryaningrum, 2000). Dengan demikian investasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Mengingat pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu faktor penentu dalam posisi perekonomian, maka secara tidak langsung investasi berpengaruh terhadap penerimaan daerah,

sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan kualitas produk dan penciptaan lapangan kerja. Melalui investasi, maka kegiatan ekonomi dapat berkembang dan kesejahteraan masyarakat dapat semakin meningkat. Jadi, investasi merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi bagi suatu perekonomian yang sedang membangun disamping faktor pertumbuhan penduduk dan kemajuan ekonomi

Penelitian yang dilakukan bahwa investasi mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi ini sejalan dengan teori pertumbuhan Harrod-Domar, yang menjelaskan bahwa investasi didalam proses pertumbuhan ekonomi memiliki peranan yang sangat menentukan, khususnya watak ganda yang dimiliki investasi yaitu (Jhingan, 1993) :

1. Menciptakan pendapatan yang disebut sebagai dampak permintaan
2. Memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal yang sering disebut sebagai dampak penawaran investasi. Selama investasi netto tetap berlangsung pendapatan nyata dan output akan senantiasa membesar.

Persaingan yang semakin tajam menuntut Pemerintah Daerah menyiapkan daerahnya sedemikian rupa sehingga mampu menarik investasi, orang dan industri ke daerah. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi, selain itu kemampuan daerah untuk menentukan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai alat ukur daya saing perekonomian daerah relatif terhadap daerah lainnya juga penting terkait dengan pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur fisik dalam upaya meningkatkan daya tariknya dan memenangkan persaingan.

BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN****5.1. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat pengaruh pada pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi pada masa desentralisasi fiskal di kota/kabupaten Provinsi Jawa Timur. Penelitian secara empiris terhadap topik ini sudah pernah dilakukan namun terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut baik dari lokasi/objek penelitian maupun dari variabel yang diambil serta kurun waktu yang diambil dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di wilayah kota/kabupaten Provinsi Jawa Timur karena Provinsi Jawa Timur mempunyai angka PDRB tertinggi kedua setelah DKI Jakarta. Penelitian ini memakai variabel PAD, DAU dan Investasi sebagai variabel independent dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependent.

Penelitian secara empiris sebelumnya sudah pernah dilakukan diantaranya oleh Amin Pujianti (2008), Joko Waluyo (2007) dan Aan Zulyanto (2010). Hasil yang mereka peroleh menyatakan bahwa PAD, DAU dan Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun tidak semua penelitian sebelumnya yang memberikan hasil yang sama dalam penelitian ini. Dalam penelitian Amin Pujianti (2008), variabel DAU memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini secara empiris menunjukkan hasil yang positif dan signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini menggunakan data panel yakni pada 38 kota/kabupaten di Jawa Timur dan pada kurun waktu 2005-2009. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dari hasil uji simultan (uji F) bahwa pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Secara parsial (uji T) Ada pengaruh yang signifikan antara variabel pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Amin Pujianti (2008) Dan dari nilai koefisien dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah (PAD) yang paling dominan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kota/kabupaten Provinsi Jawa Timur. Ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel dana alokasi umum (DAU) terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Joko Waluyo (2007). Ada pengaruh yang signifikan antara variabel investasi (PMA dan PMDN) terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori pertumbuhan Harrod-Domar dimana dengan investasi maka akan menambah stock modal yang nantinya akan memperbesar output.

5.2. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait. Adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah :

1. Melihat hasil penelitian, Pemerintah daerah sebaiknya terus meningkatkan sumber-sumber penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena hasil koefisien dari PAD cukup tinggi dan merupakan variabel yang dominan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

Dengan adanya fasilitas publik yang baik penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah akan meningkat yang nantinya mampu dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya.

2. Pemerintah daerah perlu meningkatkan investasi karena melihat dari hasil penelitian, terbukti signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Penelitian ini masih terbatas pada daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur dan terbatas pada variable pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan investasi. Untuk itu diperlukan studi yang lebih luas tentang desentralisasi fiskal serta melihat dari sudut pandang lain, sehingga akan dapat diidentifikasi daerah-daerah yang perlu didorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, serta dapat diketahui daerah-daerah yang mempunyai potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Disamping itu akan dapat memberikan sumbangan tentang pengetahuan yang lebih beragam tentang tema desentralisasi fiskal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Jogjakarta. UPP STIM YKPN
- Bank Indonesia, 2009. *Statistik Ekonomi Daerah: Kajian Ekonomi Regional 2009*. Bank Indonesia: Jakarta
- Boediono. 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta : BPFE.
- Brodjonegoro, B dan M. Sidik. 2002. *Dana Alokasi Umum : Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Dorani, Ahmad. 2010. *Analisis Pengaruh Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Terhadap PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2008*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Elmi, B. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. Penerbit Universitas Indonesia (UIPress), Jakarta.
- Gujarati, N Damodar , 2003. *Ekonometrika Dasar*. Penerbit Erlangga, Jakarta
- Irdhania, Anissa. 2009. *Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Perekonomian dan Potensi Keuangan Kabupaten Bogor*. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Jhingan, ML,. 2004. *Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mankiw, N. Gregory, 2003. *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 'Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Era Reformasi:2005-2008' dalam Abimanyu, Anggito dan Megantara, Andie, *Era Baru Kebijakan Fiskal; Pemikiran, Konsep dan Implementasi*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2009.
- Mudrajad Kuncoro, 2004. *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategis dan Peluang*. Erlangga, Jakarta.
- Mudrajad Kuncoro dan Anggi Rahajeng, 2005. *Peta dan Prospek Iklim Investasi/Bisnis di Indonesia*.Kompak No.13 Januari-April.
- Pakasi, C. 2005. *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara*. Disertasi. Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Pujianti, Amin. 2008. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan : Kajian Ekonomi Negara Berkembang* Hal: 61 – 70
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.

- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*
- Sadono Sukirno. 1996. *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah Dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Saragih, J.P. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Otonom*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sasana, Hadi, 2007. *Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*. *Dinamika Pembangunan*. Vol. 3 No. 2 / Desember 2006 : 145 - 170
- Sodik, Jamzani dan Didi Nuryadi, 2005. *Investasi dan Pertumbuhan Regional (Studi Kasus Pada 26 Propinsi di Indonesia Pra dan Pasca Otonomi)*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 10, Agustus.
- Siddik. Machfud. 2009. "Kebijakan Awal Desentralisasi Fiskal 1999-2004" Dalam Abimanyu, Anggito dan Megantara, Andie, *Era Baru Kebijakan Fiskal; Pemikiran, Konsep dan Implementasi*, Jakarta, Penerbit Kompas.
- Suryaningrum, 2000. *Pertumbuhan ekonomi Regional di Indonesia*. *Media Ekonomi dan Bisnis, FE-Undip* , Vol. XII No.1 Juni 2000.
- Tambunan, Tulus T.H. 2001. *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Todaro, Michael, P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Alih Bahasa Indonesia: Burhanudin Abdullah dan Harris Munandar.
- Todaro. Michael P. and Smith Stephen C., 2003, *Economic Development, Eighth Edition*, United Kingdom: Pearson Education Limited.
- Waluyo, Joko. 2007. *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah Di Indonesia*, Parallel Session IA: Fiscal Decentralization 12 Desember 2007, Wisma Makara, Kampus UI – Depok.
- Zulyanto, Aan. 2010. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu*. Tesis. Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro Semarang.
- Delivery, 2010. *Desentralisasi Panduan Kebijakan*. <http://www.delivery.org>.
- DJPKD, 2010. *Dana Alokasi Umum, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*. <http://www.djpkd.go.id>
- DJPKD, 2005. *Pendapatan Asli Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*. <http://www.djpkd.go.id>

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : DATA JAWA TIMUR TAHUN 2005-2009 (JUTA RUPIAH)

KOTA/KABUPATEN	TAHUN	PAD	DAU	INVESTASI	PDRB
KABUPATEN BANGKALAN	2005	23277	258229	0	2697572
	2006	23460	380000	4000	2827145
	2007	29206	426436	237000	2969196
	2008	30375	472872	0	3115331
	2009	32236	478777	725000	3269710
KABUPATEN BANYUWANGI	2005	42345	398823	1300	8390843
	2006	39816	629281	9414	8815927
	2007	61264	430851	10500	9309066
	2008	53812	771132	15500	9845053
	2009	63009	766843	15433	10439329
KABUPATEN BLITAR	2005	28137	335944	0	4338529
	2006	23380	539135	162	4571922
	2007	33486	586757	0	4836205
	2008	43592	634378	0	5128535
	2009	51044	629882	0	5394400
KABUPATEN BOJONEGORO	2005	38140	336530	7000	5329967
	2006	39086	493590	380	5892142
	2007	56462	540202	1000	6675880
	2008	48924	586814	0	7505833
	2009	59079	596440	449701	7990984
KABUPATEN BONDOWOSO	2005	20779	251718	0	1772844
	2006	17155	362750	0	1871753
	2007	24110	552361	1200	1974898
	2008	31064	447561	0	2079743
	2009	30356	455451	1690	2184020
KABUPATEN GRESIK	2005	87961	261283	747942	11892606
	2006	85070	392880	2040829	12702414
	2007	105995	462853	1573830	13553686
	2008	126920	532825	9070218	14412941
	2009	135683	511333	3985301	15318395
KABUPATEN JEMBER	2005	51473	500843	958	8236277
	2006	44205	500843	15150	8705996
	2007	68060	721688	0	9226768
	2008	91915	942533	10800	9783828
	2009	108808	940413	755	10326736

KOTA/KABUPATEN	TAHUN	PAD	DAU	INVESTASI	PDRB
KABUPATEN JOMBANG	2005	48990	328521	5051	4773510
	2006	41344	416553	375613	5047095
	2007	58476	504164	64323	5353301
	2008	63917	591774	15950	5673484
	2009	79558	601460	18400	5972302
KABUPATEN KEDIRI	2005	35894	380907	150	5232030
	2006	42961	583284	0	5471106
	2007	58476	632666	12827	5713218
	2008	54613	682047	102955	5962065
	2009	50676	701513	1969	6244595
KABUPATEN LAMONGAN	2005	41354	324917	0	3883702
	2006	32744	493991	29550	4092915
	2007	55665	635830	7926600	4328739
	2008	54555	599292	6000	4598167
	2009	66156	581728	19500	4888536
KABUPATEN LUMAJANG	2005	33655	283848	0	4793734
	2006	36143	438186	0	5044176
	2007	43072	540603	1444707	5321482
	2008	50000	537879	0	5610679
	2009	58079	534218	4250	5917165
KABUPATEN MADIUN	2005	15714	246292	0	2115604
	2006	18039	346540	0	2212871
	2007	20364	446788	4041	2329838
	2008	26268	468644	0	2452602
	2009	32754	463561	289762	2577178
KABUPATEN MAGETAN	2005	23384	261901	0	2510420
	2006	26839	405061	0	2639069
	2007	30699	447613	0	2776572
	2008	34558	490164	0	2920176
	2009	38248	489562	0	3076674
KABUPATEN MALANG	2005	54245	513563	20335	10987068
	2006	53043	795059	440386	11617937
	2007	84354	881353	130904	12325207
	2008	85620	967647	115851	13034488
	2009	103389	959115	16027650	13706633

KOTA/KABUPATEN	TAHUN	PAD	DAU	INVESTASI	PDRB
KABUPATEN MOJOKERTO	2005	38063	270558	342844	4574704
	2006	38102	398580	287996	4825150
	2007	39303	880921	86662	5111150
	2008	40503	50152	993813	5411939
	2009	50332	502177	174041	5692515
KABUPATEN NGANJUK	2005	38413	318323	0	3691208
	2006	29575	358510	525000	3913021
	2007	20736	469285	21900	4152602
	2008	48295	580060	0	4400780
	2009	61381	590835	0	4664700
KABUPATEN NGAWI	2005	13403	284397	0	2385682
	2006	13953	450161	0	2510076
	2007	20736	497520	10000	2639718
	2008	20066	544878	0	2785335
	2009	19233	555625	146741	2942603
KABUPATEN PACITAN	2005	12703	222922	4500	1162301
	2006	11843	338655	1350	1211932
	2007	21990	372687	2000	1274457
	2008	20865	406718	4900	1345501
	2009	26221	429143	2000	1427168
KABUPATEN PAMEKASAN	2005	22266	244186	0	1621138
	2006	20501	373618	0	1694484
	2007	24029	410777	0	1775107
	2008	27556	447935	1500	1873186
	2009	33426	458240	0	1970128
KABUPATEN PASURUAN	2005	64655	378252	629007	5101155
	2006	56001	455714	314399	5403935
	2007	58463	527631	803980	5737510
	2008	60924	599548	1270842	6075292
	2009	72300	606163	1091934	6397872
KABUPATEN PONOROGO	2005	27957	288950	0	2567909
	2006	24588	442634	850	2694521
	2007	35401	490597	0	2871342
	2008	33389	538560	0	3034364
	2009	41582	550746	1100	3190837
KAB. PROBOLINGGO	2005	22565	279153	39147	5126681
	2006	18547	438188	3842	5418555
	2007	35401	344534	0	5742266
	2008	32490	250880	1500617	6073914
	2009	36110	537651	106038	6421273
KABUPATEN SAMPANG	2005	14275	231753	0	2101077
	2006	13095	330911	0	2187484
	2007	16653	484750	0	2279629
	2008	20211	422388	0	2384150
	2009	30460	428946	2000	2494884
KABUPATEN SIDOARJO	2005	135312	365661	613423	20201364
	2006	156014	524136	862598	21287727
	2007	29482	583576	4395437	22386181

KABUPATEN SITUBONDO	2008	187466	643016	4493333	23431673
	2009	252593	666166	726796	24578831
	2005	24146	221834	689	2703988
	2006	14576	346404	10860	2852395
	2007	29482	387125	0	3013286
KABUPATEN SUMENEP	2008	21993	427846	310	3171091
	2009	32018	433451	11200	3330420
	2005	32965	363407	0	4381014
	2006	29091	432491	0	4567317
	2007	40924	492386	0	4786946
KABUPATEN TRENGGALEK	2008	38209	552280	2037550	5014544
	2009	38332	565851	0	5257871
	2005	20031	256498	0	1753906
	2006	56345	295978	0	1837947
	2007	41517	492667	0	1938068
KABUPATEN TUBAN	2008	26688	465748	0	2046833
	2009	34254	465955	4624	2162192
	2005	61486	295978	0	5022500
	2006	30932	513252	942900	5314227
	2007	50995	512801	200434	5659252
KAB. TULUNGAGUNG	2008	66621	512349	100000	6039564
	2009	75546	520028	1612740	6435725
	2005	30791	320158	0	5874963
	2006	19052	170379	0	6196735
	2007	50995	399402	0	6552885
KOTA BLITAR	2008	45208	628425	350	6936742
	2009	55657	625049	600	7353503
	2005	22858	121252	0	574442
	2006	40748	359132	162	608298
	2007	72486	564916	0	645936
KOTA KEDIRI	2008	28692	217166	0	686549
	2009	32802	225704	0	729203
	2005	40135	131453	150	18792298
	2006	17016	214486	0	19768496
	2007	72486	307324	12827	20660129
KOTA MADIUN	2008	66050	400162	102955	21623890
	2009	73445	408256	1969	22717911
	2005	22096	207320	0	889323
	2006	56019	367435	0	937574
	2007	22445	350377	4041	995215
KOTA MALANG	2008	18506	266187	0	1057364
	2009	23413	272311	289762	1121460
	2005	58740	221130	20335	10136321
	2006	13844	198635	440386	10745067
	2007	20417	240348	130904	11412770
KOTA MOJOKERTO	2008	78110	473050	115851	12118269
	2009	86501	471748	16027650	12712118
	2005	13019	154613	342844	4574704
	2006	13844	198635	287996	4825150
	2007	20417	210569	86662	5111150

KOTA PASURUAN	2008	17455	222502	993813	5411939
	2009	21081	238050	174041	5692515
	2005	14353	125070	629007	856746
	2006	12622	183644	314399	905174
	2007	15555	204617	803980	954629
KOTA PROBOLINGGO	2008	18487	225590	1270842	1006824
	2009	25617	230756	1091934	1057446
	2005	21141	117368	39147	1513804
	2006	24375	199720	3842	1603446
	2007	27311	212655	0	1705842
KOTA SURABAYA	2008	30247	225590	1500617	1808453
	2009	36087	259539	106038	1905227
	2005	496190	359520	3460139	59877994
	2006	536422	453753	671293	63677390
	2007	589594	352317	445558	67695820
KOTA BATU	2008	642766	250880	288592	71913820
	2009	864083	765895	748506	75892973
	2005	8415	104489	0	952545
	2006	11019	159797	0	1018210
	2007	14562	187888	0	1087390
	2008	18104	215978	0	1162187
	2009	22581	218141	0	1240527

LAMPIRAN 2 : COMMOND

Dependent Variable: PDRB
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/25/12 Time: 08:53
 Sample: 2005 2009
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1700977.	707756.4	2.403336	0.0172
PAD	104.4878	2.728741	38.29157	0.0000
DAU	-1.668763	1.572051	-1.061520	0.2898
INVESTASI	0.259685	0.142414	1.823446	0.0698
R-squared	0.892627	Mean dependent var		7196980.
Adjusted R-squared	0.890895	S.D. dependent var		11183172
S.E. of regression	3693920.	Akaike info criterion		33.10310
Sum squared resid	2.54E+15	Schwarz criterion		33.17146
Log likelihood	-3140.795	Hannan-Quinn criter.		33.13079
F-statistic	515.4250	Durbin-Watson stat		0.556377
Prob(F-statistic)	0.000000			

LAMPIRAN 3 : FIXED

Dependent Variable: PDRB
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/25/12 Time: 00:00
 Sample: 2005 2009
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4980890.	199299.6	24.99198	0.0000
PAD	31.12480	2.097715	14.83748	0.0000
DAU	0.920059	0.492584	1.867820	0.0638
INVESTASI	0.024650	0.030941	0.796680	0.4269

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.996892	Mean dependent var	7196980.
Adjusted R-squared	0.996058	S.D. dependent var	11183172
S.E. of regression	702180.3	Akaike info criterion	29.95027
Sum squared resid	7.35E+13	Schwarz criterion	-30.65094
Log likelihood	-2804.276	Hannan-Quinn criter.	30.23410
F-statistic	1194.765	Durbin-Watson stat	1.768828
Prob(F-statistic)	0.000000		

LAMPIRAN 4 : UJI CHOW

Redundant Fixed Effects Tests
 Equation: FIXED
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	135.092780	(37,149)	0.0000
Cross-section Chi-square	673.038347	37	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: PDRB
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/25/12 Time: 08:55
 Sample: 2005 2009
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1700977.	707756.4	2.403336	0.0172
PAD	104.4878	2.728741	38.29157	0.0000
DAU	-1.668763	1.572051	-1.061520	0.2898
INVESTASI	0.259685	0.142414	1.823446	0.0698

R-squared	0.892627	Mean dependent var	7196980.
Adjusted R-squared	0.890895	S.D. dependent var	11183172
S.E. of regression	3693920.	Akaike info criterion	33.10310
Sum squared resid	2.54E+15	Schwarz criterion	33.17146
Log likelihood	-3140.795	Hannan-Quinn criter.	33.13079
F-statistic	515.4250	Durbin-Watson stat	0.556377
Prob(F-statistic)	0.000000		

LAMPIRAN 5 : RANDOM

Dependent Variable: PDRB
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 01/25/12 Time: 00:05
 Sample: 2005 2009
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 190
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4747055.	533386.8	8.899836	0.0000
PAD	42.15438	1.945227	21.67067	0.0000
DAU	-0.042600	0.483778	-0.088056	0.9299
INVESTASI	0.034162	0.030887	1.106016	0.2701

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	3053998.	0.9498
Idiosyncratic random	702180.3	0.0502

Weighted Statistics

R-squared	0.590615	Mean dependent var	736141.7
Adjusted R-squared	0.584012	S.D. dependent var	1573612.
S.E. of regression	1014935.	Sum squared resid	1.92E+14
F-statistic	89.44660	Durbin-Watson stat	1.068788
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.574046	Mean dependent var	7196980.
Sum squared resid	1.01E+16	Durbin-Watson stat	0.020339

LAMPIRAN 6 : UJI HAUSMAN

Correlated Random Effects - Hausman Test
 Equation: RANDOM
 Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	205.590566	3	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PAD	31.124801	42.154384	0.616497	0.0000
DAU	0.920059	-0.042600	0.008598	0.0000
INVESTASI	0.024650	0.034162	0.000003	0.0000

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: PDRB

Method: Panel Least Squares

Date: 01/25/12 Time: 08:57

Sample: 2005 2009

Periods included: 5

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4980890.	199299.6	24.99198	0.0000
PAD	31.12480	2.097715	14.83748	0.0000
DAU	0.920059	0.492584	1.867820	0.0638
INVESTASI	0.024650	0.030941	0.796680	0.4269

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.996892	Mean dependent var	7196980.
Adjusted R-squared	0.996058	S.D. dependent var	11183172
S.E. of regression	702180.3	Akaike info criterion	29.95027
Sum squared resid	7.35E+13	Schwarz criterion	30.65094
Log likelihood	-2804.276	Hannan-Quinn criter.	30.23410
F-statistic	1194.765	Durbin-Watson stat	1.768828
Prob(F-statistic)	0.000000		

LAMPIRAN 7 : UJI GLEJSER

Dependent Variable: ABS_RES

Method: Panel Least Squares

Date: 01/25/12 Time: 00:06

Sample: 2005 2009

Periods included: 5

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	358558.0	87169.10	4.113361	0.0001
PAD	2.857048	0.336079	8.501126	0.0000
DAU	-0.514827	0.193618	-2.658984	0.0085
INVESTASI	0.020897	0.017540	1.191360	0.2350

R-squared	0.294721	Mean dependent var	315220.4
Adjusted R-squared	0.283345	S.D. dependent var	537416.8
S.E. of regression	454952.7	Akaike info criterion	28.91460
Sum squared resid	3.85E+13	Schwarz criterion	28.98296
Log likelihood	-2742.887	Hannan-Quinn criter.	28.94229

F-statistic 25.90842 Durbin-Watson stat 2.069536
 Prob(F-statistic) 0.000000

LAMPIRAN 8: WEIGHTED FIXED EFFECT

Dependent Variable: PDRB
 Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
 Date: 01/25/12 Time: 00:07
 Sample: 2005 2009
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 190
 Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5295093.	75886.12	69.77683	0.0000
PAD	24.17459	1.758751	13.74531	0.0000
DAU	1.124185	0.138121	8.139114	0.0000
INVESTASI	0.029049	0.014087	2.062142	0.0409

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics			
R-squared	0.996297	Mean dependent var	15659077
Adjusted R-squared	0.995303	S.D. dependent var	11783057
S.E. of regression	662695.3	Sum squared resid	6.54E+13
F-statistic	1002.239	Durbin-Watson stat	1.600382
Prob(F-statistic)	0.000000		

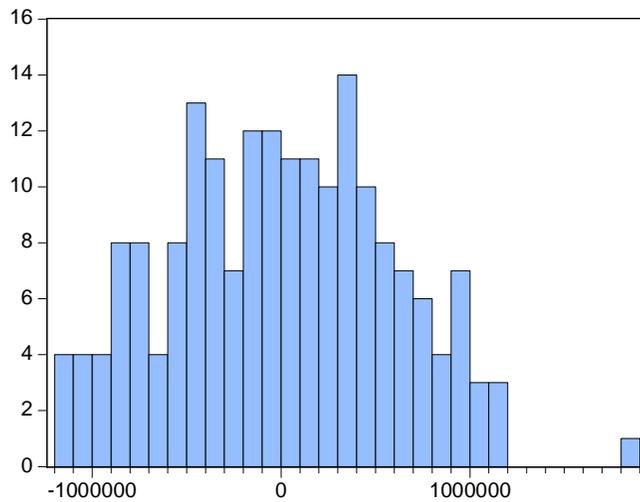
Unweighted Statistics

R-squared	0.996640	Mean dependent var	7196980.
Sum squared resid	7.94E+13	Durbin-Watson stat	1.233825

CROSSID	Effect
1	-3448153.
2	2132560.
3	-1922642.
4	-361487.0
5	-4380773.
6	5075076.
7	1387695.
8	-1896271.
9	-1414330.
10	-2786690.
11	-1559268.
12	-3949538.
13	-3724649.
14	4175935.
15	-1653107.
16	-2614006.
17	-3590299.
18	-4861551.
19	-4561093.

20	20	-1663197.
21	21	-3730707.
22	22	-665788.0
23	23	-3890406.
24	24	12713272
25	25	-3280342.
26	26	-1914412.
27	27	-4656451.
28	28	-1527546.
29	29	-169268.3
30	30	-5936116.
31	31	13786896
32	32	-5314565.
33	33	4426212.
34	34	-828183.9
35	35	-4999696.
36	36	-4498335.
37	37	46864492
38	38	-4763269.

LAMPIRAN 9 : NORMALITAS



Series: Standardized Residuals	
Sample 2005 2009	
Observations 190	
Mean	-6.19e-11
Median	1440.586
Maximum	1859752.
Minimum	-1166487.
Std. Dev.	588404.6
Skewness	0.111960
Kurtosis	2.491134
Jarque-Bera	2.446921
Probability	0.294210

LAMPIRAN 10 : UJI KAUSALITAS

Uji Kausalitas PAD dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pairwise Granger Causality Tests
 Date: 03/03/12 Time: 13:33
 Sample: 2005 2009
 Lags: 2

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
PDRB does not Granger Cause PAD	114	6.29266	0.0026
PAD does not Granger Cause PDRB		0.46034	0.6323

Uji Kausalitas DAU dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pairwise Granger Causality Tests
 Date: 03/03/12 Time: 13:42
 Sample: 2005 2009
 Lags: 2

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
DAU does not Granger Cause PDRB	114	0.74401	0.4776
PDRB does not Granger Cause DAU		0.99389	0.3735

Uji Kausalitas Investasi dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pairwise Granger Causality Tests
 Date: 03/03/12 Time: 13:43
 Sample: 2005 2009
 Lags: 2

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
PDRB does not Granger Cause INVESTASI	114	0.62309	0.5382
INVESTASI does not Granger Cause PDRB		1.09002	0.3398